**PENGARUH PENERAPAN *ELECTRONIC PROCUREMENT* DAN
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Administrasi (M.A) Pada Program Pascasarjana
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI

Disusun Oleh :

LIA HERIAWATI

BC41621043

KONSENTRASI : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
JAKARTA
2018**

**PENGARUH PENERAPAN *ELECTRONIC PROCUREMENT* DAN
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Administrasi (M.A) Program Studi Ilmu Administrasi
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing dan Direktur Program
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini**

Jakarta, 13 Nopember 2018

Menyetujui,

Dr. Mary Ismowati, M.Si
Pembimbing

Menyetujui,

Dr. Taufan Maulamin, SE, Ak, M.M.
Direktur Program

**PENGARUH PENERAPAN *ELECTRONIC PROCUREMENT* DAN
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Administrasi (M.A) Program Studi Ilmu Administrasi
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing dan Direktur Program
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini

Jakarta, 13 Nopember 2018

1. **Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM**
Ketua Penguji
2. **Prof. Dr. A. Ramadhan Siregar, MS**
Penguji Ahli
3. **Dr. Mary Ismowati, M.Si**
Pembimbing

Mengesahkan,
Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM

Dr. Ir. Panji Hendrarso, M.M
NIK : 199714563

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing/ Tim Promotor* dan masukan dari Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, 13 Nopember 2018
Yang Membuat Pernyataan

LIA HERIAWATI
BC41621043

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada pemberi rahmat dan berkah, pemegang kekuasaan tertinggi Dzat Yang Maha Kuasa – Allah SWT, karena atas ijin-NYA sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul : **“Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang”** pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAM I Jakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Panji Hendrarso, M.M. Selaku Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I Jakarta;
2. Yth. Bapak Dr. Taufan Maulamin, SE, Akt, M.M. Selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I Jakarta;

Sesungguhnya Allah Tidak akan mengubah Nasib Suatu kaum Sebelum Mereka Mengubah Diri Mereka Sendiri (Q.S Al-Ra'd 11)

"Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah Radiallahu Anhu)"

Persembahan Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami mohon pertolongan, sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku

kepada :

Suami, anak dan calon Bayiku yang selalu memberi inspirasi hidupku
kedua Orang tua dan adiku yang selalu memberi motivasi dalam Hidupku

3. Yth. Mary Ismowati, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta;
4. Para dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
6. Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang;
7. Teman-teman seangkatan pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta.

Sekali lagi, terucap terima kasih atas selesainya tesis ini, kritik dan saran kami tunggu mengingat berbagai kekurangan yang masih ada dalam tesis ini. Terima kasih.

Jakarta, 13 Nopember 2018

LIA HERIAWATI

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Lia Heriawati

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa, untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa, dan untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis regresi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 41 orang. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik total sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 41 orang responden. Setiap responden diberikan sebanyak 35 pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan alat uji regresi linier sederhana dan berganda, uji t, uji F, uji korelasi dan determinasi.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa Penerapan E-Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar 34,61 %. Kemudian Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar 10,06 %. Sedangkan Penerapan E-Procurement dan Good Governance secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar 44,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan E-Procurement dan Good Governance, maka akan semakin meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa.

Kata Kunci : Penerapan E-Procurement, Good Governance, dan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa.

ABSTRACT

The Influence of E-Procurement and Good Governance Implementation toward The Performance of Goods/Services Procurement in Division of Goods and Services Procurement of Regional Secretary in Pandeglang Regency

Lia Heriawati

This research aims to know and understand about how big the influence of E-Procurement's Implementation is toward Performance of Goods/ Services Procurement, and to know and understand how big the influence of Good Governance's implementation toward The Performance of Procurement of Goods/Services, and to know and understand about how big the influence of E-Procurement and Good Governance's Implementation collectively toward The Performance of Procurement of Goods/Services.

Method that is used in this research is qualitative method of regression analysis to see how big the influence of independent variable and dependent variable are. Population of this research is all of employees in Division of Procurement of Goods and Services of Regional Secretary in Pandeglang Regency in total of 41 people. The Determination of sample is using a total sampling technique, therefore the amount of sample that is used in total of 41 responder. Each responder is given about 35 statements with using Likert scale. Data analysis is using qualitative analysis with linear regression test and double, test t, test F, correlation test and determination.

Based on the result from data management shows that The Implementation of E-Procurement has a positive impact and significant toward The Performance of Procurement of Goods/Services in total of 34,61%. Thereafter Good Governance has a positive impact and significant toward The Performance of Procurement of Goods and Services in total of 10,06 %. Whereas The Implementation of E-Procurement and Good Governance are having a positive impact and significant collectively toward The Performance of Procurement of Goods/Services in total of 44,67%. This matter shows that the better of E-Procurement's implementation is and Good Governance, thereafter the more Performance of procurement Goods/Services increases.

Key words : Implementation of E-Procurement, good Services, and Performance of Procurement Goods/ Services.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Literatur	13
A.1. Teori Pengadaan Barang dan Jasa	13
A.2. Teori <i>Electronic Procurement</i>	15
A.3. Teori <i>Good Governance</i>	32
A.4. Teori Kinerja Lembaga	41
A.5. Penelitian Terdahulu	55

	B. Kerangka Konseptual dan Model Penelitian	62
	B.1. Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	62
	B.2. Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	63
	B.3. Pengaruh Penerapan <i>Electronic Procurement</i> Dan <i>Good Governance</i> Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	65
	C. Hipotesis	68
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	69
	B. Operasionalisasi Variabel	71
	C. Teknik Pengumpulan Data	74
	D. Teknik Sampling	76
	E. Teknik Analisis Data.....	77
	F. Lokasi dan Jadwal Penelitian	85
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	87
	A.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	87
	A.2. Deskripsi Responden Penelitian.....	94

A.3. Hasil Uji Validitas	95
A.4. Reliabilitas Instrumen	98
A.5. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian.....	99
A.6. Method of Successive Interval (MSI)	105
A.7. Uji Asumsi Klasik.....	107
A.8. Pengujian Hipotesis.....	112
A.9. Analisis Jalur	118
B. Pembahasan	121
B.1. Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Terhadap Kinerja Lembaga Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	121
B.2. Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Lembaga Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	122
B.3. Pengaruh Penerapan <i>Electronic Procurement</i> Dan <i>Good Governance</i> Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja Lembaga Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	124
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	59
Tabel 3.1 Kisi-kisi Variabel	73
Tabel 3.2 Populasi Responden	76
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	86
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Procurement (X ₁)	96
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Good Governance (X ₂)	97
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Lembaga (Y)	98
Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Penerapan E-Procurement	100
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Penerapan E-Procurement	100
Tabel 4.6 Deskriptif Statistik Good Governance	102
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Good Governance	102
Tabel 4.8 Deskriptif Statistik Kinerja Lembaga	104
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Kinerja Lembaga	104
Tabel 4.10 Hasil Transformasi MSI	106
Tabel 4.11 Uji Normalitas Variabel	107
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	109
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi	110
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t	114
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F	116
Tabel 4.16 Matriks Koefisien Korelasi Variabel Penelitian	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Konseptual Penelitian	67
Gambar 3.1 Design Penelitian	71
Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan <i>E-Procurement</i>	101
Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel <i>Good Governance</i>	103
Gambar 4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Lembaga	105
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas	111
Gambar 4.5 Nilai Koefisien Jalur Variabel Penelitian	119

Institut
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyak organisasi menghabiskan paling sedikit satu pertiga dari keseluruhan anggaran untuk pengadaan barang/jasa tak terkecuali pengadaan pada sektor publik yang pada umumnya termasuk bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah selain dari gaji pemerintah dan tunjangan sosial. Meskipun demikian terdapat penelitian yang menemukan adanya ketidakefisienan pada proses pengadaan barang/jasa kemudian akan turut berdampak pada kinerja pengadaan. Oleh sebab itu proses pengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara *online* untuk dapat membantu pemerintah dalam mengontrol pengeluaran yang dilakukan instansi pemerintah dan pada akhirnya turut berdampak pada kinerja pengadaan barang/jasa.

E-procurement termasuk salah satu alat pengadaan barang/jasa *online* yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam mengontrol pengeluaran instansi pemerintah sampai akhirnya juga diharapkan oleh banyak pihak dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor pemerintahan seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. *E-procurement* dapat menjadi alat untuk mencapai tatakelola pemeritah yang baik karena *e-procurement* memberikan kesempatan untuk semua pihak turut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa

secara virtual baik dengan melakukan tender maupun mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengembangan *E-procurement* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) *Copy To Internet* yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh panitia pengadaan; (2) *Semi E-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional); (3) *Full E-procurement* yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui sistem *E-procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan finansial, dimana beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurang dukungan dari tingkat atas manajemen, belum meratanya keterampilan dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan sistem keamanan atas *e-procurement* itu sendiri. Penyebab hambatan sistem *e-procurement* dapat ditelaah lebih lanjut dan dilihat dari sisi peraturan perundangan, sumber daya manusia dan perangkat keras dan infrastruktur jaringan.

Dengan adanya sistem *e-procurement* ini, maka kinerja institusi pemerintahan yang ada diharapkan akan meningkat, karena pembelian dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan. Hal tersebut yang sudah dipaparkan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja proses operasional yang berada dalam lembaga tersebut. Kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dan kepercayaan yang dibutuhkan juga akan mempengaruhi proses penerapan aplikasi *e-procurement* dalam memberikan dampak kepada keikutsertaan *e-marketplace* didalamnya.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka pemerintah harus

melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel.

Pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*good goodvernance*) dan transparan telah dilakukan berbagai upaya, seperti diantaranya peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa juga diterapkan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan, yang diselenggarakan secara bertanggung jawab dan bersih sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa kebijakan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada, agar menghasilkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang lakukan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang ada masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena pegawai yang ada diketahui belum semua pegawai memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa seperti beberapa

pegawai memiliki kemampuan yang lemah dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu. Selain itu dalam pelaksanaan proses seleksi perusahaan pemenang lelang masih ditemukan adanya kejanggalan seperti panitia menyeleksi perusahaan pemenang dengan nilai penawaran terendah, sementara penawaran tertinggi tidak dievaluasi. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya faktor penerapan *elektronik procurement* dan *good governance*. Selain itu adanya faktor lain diduga juga dapat mempengaruhi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yaitu kepemimpinan, kompensasi, koordinasi, budaya kerja, disiplin kerja, pendidikan formal, fasilitas kerja, kualitas sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, kompetensi jabatan, budaya organisasi, pengawasan melekat dan lain-lain.

Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat dipengaruhi oleh faktor penerapan *electronic procurement*. *Electronic Procurement* dapat diartikan sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Dari hasil penelitian sementara pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, penerapan *electronic procurement* yang ada masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum diterapkannya *electronic procurement* sebagai alat untuk proses penyediaan barang/jasa

sehingga proses pengadaan barang masih belum transparan dan belum dapat diakses oleh masyarakat.

Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga dapat dipengaruhi oleh faktor *good governance*. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil observasi pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, *good governance* masih lemah. Hal ini disebabkan oleh perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Selain itu masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang berakibat pada kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan masih terdapat praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya

ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas serta mengingat akan arti pentingnya pemecahan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang : **“Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan pada latar belakang masalah di atas, untuk melakukan penelitian lebih terarah maka masalah tersebut perlu diidentifikasi sehingga dapat diketahui sebab terjadinya masalah tersebut yang pada gilirannya akan diteliti sesuai dengan batasan kemampuan peneliti. Dengan demikian, penulis mengidentifikasikan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan *Electronic Procurement* masih rendah.
2. Lingkungan kerja yang ada masih lemah dan sering menimbulkan ketidakselarasan dalam bekerja.
3. *Good Governance* yang diterapkan masih lemah.
4. Gaya Kepemimpinan yang ada masih kurang memuaskan.
5. Perencanaan Sumber Daya Manusia masih rendah.

6. Motivasi yang ada masih rendah.
7. Disiplin kerja masih lemah.
8. Profesionalisme pegawai yang ada masih lemah.
9. Fasilitas kerja yang ada masih kurang memadai.
10. Pengawasan Melekat yang ada masih lemah.
11. Prestasi Kerja pegawai masih kurang memuaskan.
12. Kompensasi masih belum memuaskan.
13. Pemberian hukuman terhadap penegakkan disiplin pegawai belum optimal.
14. Budaya kerja masih lemah.
15. Komunikasi yang ada masih lemah.
16. Budaya organisasi masih rendah.
17. Latar belakang pendidikan masih rendah.
18. Koordinasi baik antar pegawai maupun antar bagian masih sering menimbulkan ketidakselarasan dalam bekerja.

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan pada hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada pengkajian tentang Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* dalam kaitannya dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Pembatasan tersebut bermaksud untuk membuat ruang lingkup

penelitian menjadi lebih fokus, sehingga pelaksanaan maupun analisisnya dapat dilakukan secara lebih tajam dan akurat.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian mengenai Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang ?
2. Seberapa besar pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang ?
4. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menanalisis dan mengevaluasi besarnya pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk menanalisis dan mengevaluasi besarnya pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk menanalisis dan mengevaluasi besarnya Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pemerintahan daerah, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Para Peneliti

Manfaat bagi para peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi mereka yang menaruh minat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Manfaat bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan ilmu mengenai pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai belum optimalnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dan hubungannya dengan kedua faktor yang telah diungkapkan diatas.

Institut
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

BAB II

KAJIAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Literatur dan Penelitian Terdahulu

A.1. Teori Administrasi

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu "*ad*" dan "*ministrate*" yang berarti "*to serve*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu pemerintah agar tujuan tercapai. Menurut pendapat Prof. Dr. H. Hadari Nawawi dan Dra. H. M. Martini Hadari dalam buku Ilmu Administrasi (1994 : 28) disebutkan Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian suatu organisasi agar secara keseluruhan selalu terarah pada pencapaian tujuannya.

Dengan demikian Administrasi berarti rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama.

Para praktisi cenderung pada administrasi dalam pengertian operasional, dengan demikian rumusan-rumusan para ilmuwan yang bergerak dilingkungan Ilmu Administrasi harus bersifat applied (terpakai) agar dapat dipetik manfaatnya oleh orang-orang yang menempati posisi sebagai administrator.

Menurut Handayani (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut :

Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila diterapkan

secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi.

Sondang P. Siagian (1974:2) mengatakan bahwa Administrasi adalah :

“Keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun menurut Chander dan Plano (2004:3) mengemukakan bahwa :

“Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam publik”.

A.2. Teori *Electronic Procurement*

A.2.1. Pengertian *Electronic Procurement*

Djoyosoekarto (2008:10) mengidentifikasikan *e-procurement* sebagai pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian.

Menurut Willem (2012:80) *e-procurement*, yaitu :

“Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI)”

Menurut Sutedi (2012:254), yaitu:

“*E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.”

Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa :

“Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut A.H. Rahadian dan Irman Gapur (2015:3) sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi dilingkungan pemerintah yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran atau pendistribusian informasi.

Pengertian di atas diketahui bahwa untuk menyampaikan informasi agar proses penyampaian informasi dengan lebih cepat, akurat kepada para pengguna informasi tersebut yang biasanya menggunakan teknologi informasi yang berupa *electronic*

goverment dengan mempergunakan media web sebagai penyampaian informasi, sehingga pengguna informasi mendapatkan nilai dan arti serta manfaat sebagai pemenuhan kebutuhannya, baik untuk keperluan lingkungan Instansi pemerintahan maupun masyarakat.

A.2.2. Manfaat *Electronic Procurement*

Pemanfaatan *e-procurement* juga menunjukkan bahwa teknologi juga dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit dicapai. Adapun manfaat *e-procurement* menurut Yudho Giri (2009:36) antara lain:

1. *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
2. *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
3. *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.

4. *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.
5. *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
6. *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi.

Menurut Sutedi (2012-254) manfaat lain dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu :

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Dimitri (2006:21) dalam Badzlina Daroyani Novitaningrum (2014), mengemukakan keutamaan *e-procurement* yakni:

“...different from standard paper- based tendering, it is a common feeling among the surveyed institutions that an online auction is very useful because it allows the use of different kinds of auction formats (berbeda dengan proses lelang paper-based, terdapat berbagai pendapat dari kalangan institusi survei bahwa sistem online sangat bermanfaat karena mengadopsi berbagai macam format lelang).”

Menurut Wardiyanto (2012:30):

“*E-procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah”.

Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan dengan baik dan benar dapat memberikan banyak manfaat salah satunya efisiensi waktu, dimana dengan adanya *e-procurement* waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan sehingga paket-paket proyek lebih tepat waktu.

A.2.3 Faktor Kesuksesan Penerapan atau Implementasi *E-Procurement*

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

1. *e-Leadership*: implementasi *e-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana.
2. Transformasi pola pikir dan pola tindak: implementasi *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait.
3. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM): teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan

jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki.

4. Ketersediaan infrastruktur: infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu :

“Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana semua proses *e-procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

A.2.4. Tujuan *E-procurement*

Tujuan diadakanya *e-procurement* menurut Sutedi (2012:258) adalah:

“Untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi *online* antara *buyer* dengan *vendor*; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.”

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi.
2. Mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN.
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme.
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan.

Menurut James E Demin dari *Infonet Service Corp* dalam Dimas Aditya (2014) menyatakan bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
2. Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.
2. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan dimana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
3. Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
4. Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.
5. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
6. Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.

7. Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
8. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *e-procurement* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta menciptakan transparansi dalam proses nya.

A.2.5. Proses Pelaksanaan *E-procurement*

Menurut website (<http://www.kpk.go.id/id/pengadaan/e-procurement-lpse>) Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah:

“Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.”

Berikut ini adalah tahapan *e-procurement* menurut website LPSE (Sumber: www.lpse.go.id), yaitu:

1. Persiapan Pengadaan

- a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
- b. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
 - i. Kategori paket pekerjaan;
 - ii. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
 - *e-lelang Umum* Pra Kualifikasi dua file;
 - *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi satu file;
 - *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi dua file.
 - iii. Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 - iv. Harga Perkiraan Sendiri;
 - v. Persyaratan kualifikasi;
 - vi. Jenis kontrak;
 - vii. Jadwal pelaksanaan lelang; dan viii. Dokumen Pemilihan.

2. Pengumuman Pelelangan

- a. Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam *website* LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di *website* LPSE yang bersangkutan.

3. Pendaftaran Peserta Lelang

- a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.
- b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas.
- c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (*download*) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

4. Penjelasan Pelelangan

- a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui *website* LPSE yang bersangkutan.
- b. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.

5. Penyampaian Penawaran

- a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barangjasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
- b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

6. Proses Evaluasi

- a. Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
- b. Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat *e-procurement* LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

- c. Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.
- d. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (*off line*) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
- e. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang

- a. Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
- b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman

pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

9. Sanggah

- a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
- b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.

10. Pasca pengadaan

- a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada Peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui.
- b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE.
- c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara

tertulis.

- d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan di luar SPSE.
- e. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait.
- f. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui *website* LPSE terkait.

A.2.6. Dimensi Penerapan *e-procurement*

Penerapan *e-procurement* sebagaimana telah diungkapkan oleh Willem (2012:11) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan dimensi penerapan *e-procurement*, Willem (2012:11-12) mengemukakan bahwa untuk mendukung penerapan *e-procurement* ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi yang meliputi:

1. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

2. Efektif

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Kompetitif

Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

4. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Bertanggungjawab

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

Kegiatan *e-procurement* tersebut tidak terlepas dari sistem informasi yang membantu dalam pengerjaan pengadaan barang/jasa, seperti yang dikemukakan oleh Jogyanto (2005:11) :

“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

A.2.7. Metode Pelaksanaan *e-procurement*

Dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012:81) yang dikutip oleh Damayanti, dkk (2014:6), yaitu:

1) *e-Tendering*

e-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2) *e-Bidding*

e-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).

3) *e-Catalogue*

e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4) *e-Purchasing*

e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

A.3. Teori *Good Governance*

A.3.1. Pengertian *Good Governance*

Padanan kata *governance* dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) berarti perihal mengurus atau mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi.

Sedangkan penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata *government* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009: 273).

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Sedangkan arti *good* dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung pemahaman :

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009: 274).
- c. Pemerintahan (*governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) adalah *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah

atas kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273).

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007: 2).

Sedangkan OECD dan *World Bank* mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009: 273).

Menurut A.H. Rahadian (2009:81) *Corporate Governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

A.H. Rahadian (2010:6) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong pengembang praktik *Good Governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* dapat diterjemahkan secara relatif lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

A.3.2. Aktor-aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain :

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan- kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas- dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat

yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga *independent* yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Good Governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *Good Governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

A.3.3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu :

- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
- b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.

- c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam *Good Governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip *good governance* antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat

tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. Mustopadidjaja (2003) mengatakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum (Sedarmayanti, 2009:282-287).

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289).

Public Private Partnership adalah salah satu jenis Privatisasi yang diartikan pengaturan di mana pemerintah memerlukan insentif modal, kebutuhan akan infrastruktur dengan masa pakai jangka panjang, dan kombinasi pembiayaan pembangunan fasilitas yang diinginkan antara pemerintah dengan swasta (sebagian besar biaya biasanya dibiayai oleh swasta).

Menurut Mary Ismowati (2016:146) mengemukakan bahwa tujuan *Public Private Partnerships* adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat baik dalam kualitas dan kuantitas dengan cara menambah modal, menangani resiko bersama dengan lebih efisien.

A.3.4. Kendala Mewujudkan *Good Governance*

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009: 310-311).

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat

perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Sedarmayanti, 2009: 310-311)

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001 dalam Sedarmayanti, 2009: 311).

A.4. Teori Kinerja Lembaga

Kinerja seseorang dapat dilihat dengan cara membandingkan standar yang telah ditetapkan versus realisasi yang telah dicapai. Hal ini seperti tampak pada konstataasi Sayle & Strauss dalam Wibowo (2007:58) yang menyatakan:

“In effect, the standard established a target, and at the end of the target periode (week, month, year) both manager and boss can compare the expected standard of performance with actual level of achievement.”

Kinerja adalah kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi, yakni bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi. Standar kinerja diperlukan karena dua alasan. Pertama, membimbing perilaku pekerja untuk menyelesaikan

standar yang telah dibangun. Apabila manajer menciptakan standar kinerja dengan pekerja dan memperjelas apa yang diharapkan, hal tersebut akan merupakan latihan yang berharga. Hal ini karena orang menginginkan melakukan pekerjaan yang dapat diterima.

Kedua, menyediakan dasar bagi kinerja pekerja dapat dinilai secara efektif dan jujur. Sampai standar kinerja dibuat, penilaian sering bias terhadap perasaan dan evaluasi subyektif. Tanpa memandang pendekatan dan bentuk yang digunakan dalam program review kinerja dan penilaian, proses klarifikasi dari apa yang diharapkan merupakan hal yang penting jika program berjalan efektif. Standar kinerja merupakan cara terbaik untuk melakukannya.

Kinerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang yang bekerja digerakan oleh suatu motif. Motif pada dasarnya bersumber pertama-tama berbagai kebutuhan dasar individu atau dapat dikatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan atau dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut dan seberapa besar keyakinan organisasi akan memberikan

kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya.

Menurut Hasibuan (2006:78) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.

Menurut Simamora (2007:144) kinerja karyawan (*employee performance*) adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Untuk meningkatkan kinerja, biasanya manajemen menggunakan teknik penilaian (*appraisal*).

Pada organisasi modern, penilaian memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja dan untuk memotivasi kinerja individu di waktu berikutnya.

Menurut Mangkunegara (2007:76) kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Wibowo (2007:59) Standar kinerja merupakan elemen penting dan sering dilupakan dalam proses review kinerja. Standar kinerja menjelaskan apa yang diharapkan manajer dari pekerja sehingga harus dipahami pekerja. Kualifikasi tentang apa yang diharapkan merupakan hal yang penting untuk memberi pedoman perilaku pekerja dan dipergunakan sebagai dasar untuk penilaian.

Dari pengertian ini standar kinerja merupakan tolok ukur terhadap mana kinerja diukur agar efektif. Standar kinerja harus dihubungkan dengan hasil yang diinginkan dari setiap pekerjaan.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli tentang arti standar kinerja. Wibowo (2007:61) menggunakan definisi sebagai "kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan baik," sementara yang lainnya menggunakan definisi "kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan cara yang dapat diterima".

Kinerja pegawai yaitu penampilan hasil karya pegawai baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada pegawai yang memegang jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran pegawai di dalam organisasi. Dimensi kinerja pegawai menurut Gery Dessler (2004:57) meliputi : a. kualitas kerja (*quality of output*); b. kuantitas kerja (*quantity of output*); c. jumlah waktu kerja (*time of work*); d. kerjasama (*corporation*); e. supervisi (*supervision*).

Menurut Kirkpatrick dalam Wibowo (2007:71), terdapat delapan karakteristik yang membuat suatu standar kinerja efektif, yaitu sebagai berikut: didasarkan pada pekerjaan, dapat dicapai, dapat dipahami, disepakati, spesifik dan sedapat mungkin terukur, berorientasi pada waktu, harus tertulis, dan dapat berubah.

Mondy dkk (1998:155) mengidentifikasi lima standar yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pegawai, yaitu:

- a) *Time standards. Time standards state the length of time it should take to make a certain product or perform a certain service.*
- b) *Productivity standards. These standards are based on the amount of product or service produced during a set time period.*
- c) *Cost standards. These standards are based on the cost associated with producing the goods or service.*
- d) *Quality standards. These are based on the level of perfection desired.*
- e) *Behavioral standards. These are based on type of behavior desired of workers in the organization.*

Selain dengan faktor-faktor tersebut, menurut Furtwengler dalam Mangkunegara (2007:141-143), untuk melihat prestasi kerja karyawan dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut:

a. Kecepatan

Kecepatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kecepatan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kecepatan sangatlah penting bagi keunggulan bersaing perusahaan.

b. Kualitas

Kualitas dapat dipandang sebagai kemampuan karyawan untuk bekerja sesuai dengan tuntutan perusahaan atau pelanggan.

c. Layanan

Faktor layanan terkait dengan kemampuan seorang karyawan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya atau konsumen yang umumnya dilakukan untuk perusahaan-perusahaan jasa.

d. Nilai

Faktor nilai tercermin dari tindakan karyawan dalam menjalankan setiap aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya di perusahaan.

e. Keterampilan interpersonal

Faktor keterampilan interpersonal terkait dengan kemampuan karyawan untuk menjalin hubungan dengan sesama karyawan.

f. Mental untuk sukses

Mental untuk sukses terkait dengan sikap optimisme karyawan dalam menjalankan pekerjaan dan juga berkenaan dengan usaha-usaha yang dilakukan karyawan dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

g. Terbuka untuk berubah

Keterbukaan untuk berubah merupakan suatu sikap untuk mau menerima atau mau berusaha melakukan suatu perubahan dalam dirinya atau lingkungan kerjanya demi suatu perbaikan.

h. Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, yang ditandai dengan

kemampuan untuk melakukan investasi dalam bentuk baru dan kemampuan untuk menghasilkan gagasan secara terus menerus.

i. Keterampilan berkomunikasi

Komunikasi menjadi salah satu aktivitas organisasi yang tidak bisa diabaikan dan senantiasa mendominasi dalam setiap aktivitas organisasi.

j. Inisiatif

Inisiatif merupakan kemauan untuk melakukan suatu hal berdasarkan kesadaran sendiri dan tanpa harus melalui perintah atau tekanan dari orang lain.

k. Perencanaan organisasi

Perencanaan merupakan langkah awal yang mesti dilakukan oleh setiap individu ataupun organisasi sebelum melakukan aktivitas.

Menurut Suprihanto (2007:47) dapat mengacu pada kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa dan kepemimpinan.

1. Kesetiaan :

ialah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

2. Prestasi Kerja

ialah suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

3. Tanggung Jawab

ialah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

4. Ketaatan

ialah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

5. Kejujuran

ialah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

6. Kerja sama

ialah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas

yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

7. Prakarsa

ialah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

8. Kepemimpinan

ialah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi pegawai yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

Standar-standar atau aspek-aspek tersebut dapat dimanfaatkan dan dijadikan kriteria atau parameter untuk melihat kinerja pegawai dalam suatu organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintahan.

Ada beberapa definisi atas batasan mengenai kinerja atau *job performance*, sebagaimana dikutip oleh As'ad dalam bukunya Psikologi Industri (1995:47-48) *Job performance* ialah *seccesful role achievement* yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Dari batasan-batasan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud

dengan *Job Performance* adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Tingkat keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dinamakan *level of performance*. Orang yang *level of performance*-nya tinggi dikatakan orang yang produktif, sedang orang yang *level of performance*-nya tidak mencapai standar disebut tidak produktif atau *performance*-nya rendah.

Kinerja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasikan mencari keuntungan maupun organisasi pemerintahan atau organisasi sosial atau organisasi keagamaan tergantung kepada etos kerja dari peserta organisasi bersangkutan.

Dalam konteks sikap mental aparat pemerintah, maka kinerja individu pegawai juga dipengaruhi oleh kualitas moral yang dimiliki tiap individu tersebut. Saefullah (2005:99) mengemukakan bahwa, kualitas moral merupakan penyokong (bahkan melandasi) sikap mental, berisi kebajikan yang terdiri dari sabar, jujur, loyal, sopan, hemat, rendah hati dan sebagainya.

Menurut Mary Ismowati (2018:141) Faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan, adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia/pegawai (*Customer Service Officer*) yang melayani masyarakat harus memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Disamping itu, *Customer Service Officer*

harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab penuh terhadap yang dilayaninya.

Kelembagaan menurut Uphoff (1992) dan Fowler (1992) adalah *"a complex of norm and behavior that persist overtime by serving some socially valued purpose"* sedangkan organisasi adalah struktur peran yang diakui dan diterima. Mengacu pada konsep kelembagaan yang diajukan oleh Gilin dan Gilin (1954) tentang tingkat kemantapan tertentu dari kelembagaan, Horton dan Hunt (1984) tentang rutinisasi dari kelembagaan, dan Uphoff (1986) dalam Saptana (2006) yang menyatakan bahwa :

"Kelembagaan sebagai pola perilaku yang stabil, dihargai dan berlaku dalam waktu yang lama, maka bagian pokok lainnya yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan mengenai kinerja kelembagaan adalah tentang pola perilaku atau pola interaksi yang terjalin antar pelaku dalam suatu kelembagaan".

Kata kelembagaan merujuk kepada sesuatu yang bersifat mantap yang hidup di dalam masyarakat (Koentjaraningrat 1997). Secara konseptual, kelembagaan berasal dari istilah pranata yang mengandung pengertian sebagai padanan institution dan pranata sosial sebagai social institution. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang. Kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuantujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa

berbentuk tradisional dan modern, dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Menurut Pakpahan (1989) dalam Elizabeth (2010), suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama, yaitu: (1) jurisdiction of boundary (batas yurisdiksi), (2) property right (hak kepemilikan), (3) rule of representation (aturan representasi). Perubahannya menghasilkan performance yang diinginkan, dan ditentukan oleh: (1) sense of community (perasaan sebagai satu masyarakat), (2) eksternalitas, (3) homogenitas, dan (4) economic of scale (skala ekonomi). Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi, dunia berisi kelembagaan-kelembagaan dan manusia pasti masuk kelembagaan tersebut (Sudaryanto 2005).

Salah satu ciri umum kelembagaan adalah adanya suatu tingkat kekekalan atau kemapanan (Gilin dan Gilin 1954 dalam Saptana 2006) sehingga aturan main dalam suatu kelembagaan juga telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, dan mungkin masih akan berlaku dalam jangka waktu yang lama lagi. Namun jika mengacu pada pendapat Granovetter dan Swedberg (1992) yang

menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi dikonstruksikan secara sosial, maka juga tidak tertutup kemungkinan adanya konstruksi ulang mengenai aturan main yang berlaku. Mengacu pada pendapat di atas, maka pembahasan mengenai aturan main dalam kelembagaan ini akan mencakup tentang aturan main itu sendiri dan perubahan-perubahan yang terjadi pada aturan main, serta bagaimana dan oleh siapa aturan main tersebut dikonstruksi.

Pada intinya, kelembagaan adalah jejaring yang terbentuk dari sejumlah, mungkin puluhan sampai ratusan interaksi atau bisa disebut kelembagaan sebagai interaksi yang berpola. Dari interaksi inilah dapat dipahami sebuah kelembagaan hanya dengan memahami bagaimana pola, ciri, dan bentuk sebuah interaksi dan dalam satu kelembagaan, sebagian besar interaksi berbentuk sama.

Dalam proses pengembangan kelembagaan, beberapa prinsip ini perlu dijadikan pegangan (Sudaryanto 2005), yaitu:

- Pahami setting masyarakat setempat, karakteristik dan konfigurasi ekonomi, politik, dan sosial setempat, serta level kolektivitas dan individualitasnya.
- Bidang pekerjaan yang akan dilakukan, jenis, dan sifat interaksi yang ada di dalamnya, serta adanya motivasi sosial dan ekonomi yang tercampur didalamnya.

- Pelajari kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, aktivitas yang akan dijalankan, manfaat, dan masalah yang ada.
- Kelompokkan basis kelembagaan yang sesuai untuk tiap aktivitas yang akan dijalankan, kecocokan, pola komunitas, pola pasar, pola pemerintah, dan basis pelayanan.
- Pahami pula kekentalan kelembagaan yang sesungguhnya diperlukan, penguatan personal relation, personal network, dan organisasi.

Kriteria kelembagaan untuk tujuan praktis yang dihubungkan dengan pembentukan kelembagaan urutannya sebagai berikut (Suradisastra 2009) :

1. Terorganisir dan memiliki norma atau aturan yang ditegakkan.
2. Memiliki cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai.
3. Secara konsisten melakukan suatu fungsi secara berulang dan telah dilakukan dalam jangka cukup lama.
4. Melakukan interaksi dengan lembaga lain sebagai manifestasi saling ketergantungan antar lembaga.

Kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik, baik berupa hasil kerja maupun proses kerjanya. Adapun dimensi dari kinerja lembaga menurut Muhaimin (2010:374) terdiri dari : 1) Konteks; 2) Input; 3) Proses; 4) Output; dan 5) Outcome.

A.5. Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau acuan untuk menunjang keakuratan data penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Landasan penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti dalam memilih dan menentukan teori yang akan digunakan dan juga memilih variabel yang tepat dalam penelitian ini.

Untuk penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh A.h. Rahadian Dan Irman Gapur (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Sistem E-Procurement Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode explanatory kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara parsial dan berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data di peroleh hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem e-*Procurement* terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor, terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor, dan terdapat pengaruh

positif dan signifikan Sistem *e-Procurement* dan Kompetensi secara bersama-sama terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor.

Kedua, penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2017) dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan”. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian korelasional (*Correlational Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- (1) Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- (2) Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- (3) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
- (4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Maria Rofina (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di BEI”. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan analisis statistik yang berupa uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *net profit margin*, penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on investment*, dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on equity*.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Mahardika lintangsari, Dini Wahyu Hapsari, Eddy Budiono (2017) dengan judul *“The Effect of E-Procurement Implementation, Internal Control of Preventing Fraud (Empirical Study on PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten)”*. The research data is analyzed by using descriptive statistical analysis, validity and reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis. The result of the study shows that the implementation of e-procurement, internal control system, and prevention fraud in PT.PLN (Persero) Distribution West Java and Banten are in a good category. Based on the hypothesis test, the result shows that the implementation of e-procurement, and internal control, partially has significant effect for prevention fraud. Simultaneously, the implementation of e-procurement, and internal control significantly effects for prevention fraud in PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten.

Kelima, penelitian oleh Lisa Oktaviani (2017) dengan judul *“The Effect of E-Procurement Against the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan”*. The research data is analyzed by using descriptive statistical analysis. The results of research partially is where the planning stage, and the stage of preparation of tender documents was effect on the prevention of procurement fraud, as weel as on the stage of the auction refutation influence the

detection fraud procurement. While the variable stage of formation of the committee, the prequalification phase, evaluation stage, the bidding stage, the phase announcement of auction no significant effect on procurement fraud prevention and detection.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Andri Veno (2015) dengan judul *“The Influence of Good Corporate Governance toward Corporate Performance of Corporate Manufacture Go Public. The method analysis of this research using multiple regression. Results from this research show that (1) The size of the council of directors significant positive effect to the corporate performance, (2) Independent council commissioner wasn’t significant effect to corporate performance (3) the total of council commissioner wasn’t significant effect to corporate performance (4) Audit Committee significant positive effect to corporate performance (5) Simultan, Size of the directors council, Independent of the commissioners council, the total of commissioners council and the Audit Committee had a significant effect to the corporate performance.* Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Sistem E-Procurement Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor. A.h. Rahadian Dan Irman Gapur (2015)	Explanatory kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara parsial dan berganda	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem e- <i>Procurement</i> terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor, terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem e- <i>Procurement</i> dan Kompetensi secara bersama-sama terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor.
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. Sulistiyowati (2017)	penelitian korelasional (<i>Correlational Research</i>)	(1) Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. (2) Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. (3) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. (4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di BEI. Maria Rofina (2013)	Analisis statistik berupa uji statistik t	Penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>net profit margin</i> , penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>return on investment</i> , dan penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>return on equity</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

4	<i>The Effect of E-Procurement Implementation, Internal Control of Preventing Fraud (Empirical Study on PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten). Mahardika lintangsari, Dini Wahyu Hapsari, Eddy Budiono (2017)</i>	<i>The research data is analyzed by using descriptive statistical analysis, validity and reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis</i>	<i>The result of the study shows that the implementation of e-procurement, internal control system, and prevention fraud in PT.PLN (Persero) Distribution West Java and Banten are in a good category. Based on the hypothesis test, the result shows that the implementation of e-procurement, and internal control, partially has significant effect for prevention fraud. Simultaneously, the implementation of e-procurement, and internal control significantly effects for prevention fraud in PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten.</i>
5	<i>The Effect of E-Procurement Against the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan. Lisa Oktaviani (2017)</i>	<i>The research data is analyzed by using descriptive statistical analysis</i>	<i>The results of research partially is where the planning stage, and the stage of preparation of tender documents was effect on the prevention of procurement fraud, as weel as on the stage of the auction refutation influence the detection fraud procurement. While the variable stage of formation of the committee, the prequalification phase, evaluation stage, the bidding stage, the phase announcement of auction no significant effect on procurement fraud prevention and detection.</i>

Lanjutan Tabel 2.1

6	<i>The Influence of Good Corporate Governance toward Corporate Performance of Corporate Manufacture Go Public.</i> Andri Veno (2015).	<i>The method analysis of this research using multiple regression.</i>	<i>Results from this research show that (1) The size of the council of directors significant positive effect to the corporate performance, (2) Independent council commissioner wasn't significant effect to corporate performance (3) the total of council commissioner wasn't significant effect to corporate performance (4) Audit Committee significant positive effect to corporate performance (5) Simultan, Size of the directors council, Independent of the commissioners council, the total of commissioners council and the Audit Committee had a significant effect to the corporate performance.</i>
---	--	--	---

Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Dimana lokasi yang akan diteliti oleh penulis terletak di Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Adapun untuk persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan variabel terikat yang sama yaitu tentang kinerja pegawai dan terdapat kesamaan pada variabel bebas.

B. Kerangka Konseptual dan Model Penelitian

B.1. Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik, baik berupa hasil kerja maupun proses kerjanya. Adapun dimensi dari kinerja lembaga menurut Muhaimin (2010:374) terdiri dari : 1) Konteks; 2) Input; 3) Proses; 4) Output; dan 5) Outcome.

Kinerja pengadaan barang/jasa dipengaruhi oleh faktor Penerapan *Electronic Procurement*. Willem (2012:11) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan dimensi penerapan *e-procurement*, Willem (2012:11-12) mengemukakan bahwa untuk mendukung penerapan *e-procurement* ada beberapa dimensi yang

harus dipenuhi yang meliputi : a. Efisien; b. Efektif; c. Kompetitif; d. Transparan; dan e. bertanggung jawab.

Dengan demikian dapat diduga terdapat pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

B.2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik, baik berupa hasil kerja maupun proses kerjanya. Adapun dimensi dari kinerja lembaga menurut Muhaimin (2010:374) terdiri dari : 1) Konteks; 2) Input; 3) Proses; 4) Output; dan 5) Outcome.

Kinerja pengadaan barang/jasa dapat dipengaruhi oleh faktor *Good Governance*. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat

yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007: 2).

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip- prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, kejelasan dan ketersediaan, dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289).

Dengan demikian dapat diduga terdapat pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

B.3. Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance Secara Bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik, baik berupa hasil kerja maupun proses kerjanya. Adapun dimensi dari kinerja lembaga menurut Muhaimin (2010:374) terdiri dari : 1) Konteks; 2) Input; 3) Proses; 4) Output; dan 5) Outcome.

Kinerja pengadaan barang/jasa dipengaruhi oleh faktor Penerapan *Electronic Procurement*. Willem (2012:11) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan dimensi penerapan *e-procurement*, Willem (2012:11-12) mengemukakan bahwa untuk mendukung penerapan *e-procurement* ada beberapa dimensi yang

harus dipenuhi yang meliputi : a. Efisien; b. Efektif; c. Kompetitif; d. Transparan; dan e. bertanggung jawab.

Kinerja pengadaan barang/jasa juga dapat dipengaruhi oleh faktor *Good Governance*. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007: 2).

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, kejelasan dan ketersediaan, dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289).

Dengan demikian dapat diduga terdapat pengaruh penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Untuk model penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan variabel dan eksplanasi serta pengumpulan data melalui metode survei. Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu ada hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Ditegaskan Sugiyono (2004:36) bahwa yang dimaksud dengan hubungan causal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian ini bermaksud menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini model kerangka konseptual penelitian :

Gambar 2.1. Model Kerangka Konseptual Penelitian

C. Hipotesis

Diketahui hipotesis dari penelitian mengenai pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Penerapan *Electronic Procurement* berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Institut
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif analisis regresi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Pendekatan ini lebih mengandalkan angka-angka berupa skor sebagai kerangka dasar analisis. Skor tersebut diperoleh dengan metode survei. Metode ini menurut Kerlinger & Lee (2000:599), lazimnya digunakan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel.

Adapun untuk survei pada penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari sikap, keyakinan, nilai-nilai, demografi, tingkah laku, opini, kebiasaan, keinginan, ide-ide, dan tipe informasi lain yang diperlukan untuk kepentingan penelitian (Mcmillan & Schumacher, 2006:233). Dari data, fakta atau informasi yang diperoleh melalui survei tersebut dapat digambarkan kondisi masing-masing variabel yang diteliti sehingga memungkinkan untuk diketahui Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini yaitu berupa kajian terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, maka hasilnya diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan perbandingan dalam meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Kajian terhadap data penelitian akan disajikan secara redaksional serta akan menjelaskan pengaruh indikator-indikator Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* terhadap indikator yang terkandung dalam konsep Kinerja Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, berdasarkan dimensi tujuan penjelasan, penelitian ini menerapkan dimensi penjelasan.

Dimensi yang sesuai dengan penelitian ini adalah dimensi *cross-sectional* 'satu periode tertentu dalam satu waktu' yakni penelitian ini meliputi beberapa bulan dalam satu tahun yaitu antara bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Pada penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang relevan dipilih penulis adalah dimensi survei karena terdapat populasi dari objek penelitian. Dari populasi tersebut kemudian ditarik sampel dengan rumus-rumus statistik yang sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan.

Model penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Design Penelitian

Keterangan :

- X_1 : Penerapan *Electronic Procurement*
- X_2 : *Good Governance*
- Y : Kinerja Lembaga
- ϵ : Faktor-faktor lain di luar X_1 , dan X_2 yang mempengaruhi terhadap Y akan tetapi tidak diteliti
- r_{12} : Koefisien korelasi X_1 dan X_2
- r_{X1Y} : Koefisien korelasi X_1 dan Y .
- r_{X2Y} : Koefisien korelasi X_2 dan Y .

B. Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

1. Penerapan *Electronic Procurement*.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab.

2. *Good Governance*

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, kejelasan dan ketersediaan, dan partisipasi.

4. Kinerja Lembaga

Kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik, baik berupa hasil kerja maupun proses kerjanya. Adapun dimensi dari kinerja lembaga menurut Muhaimin (2010:374) terdiri dari : 1) Konteks; 2) Input; 3) Proses; 4) Output; dan 5) Outcome.

2. Kisi-kisi Variabel Penelitian

Dengan memperhatikan pada kisi-kisi variabel dalam penelitian ini yang memuat deskripsi dimensi (*subvariabel*), dimana setiap dimensi dirumuskan indikatornya untuk kemudian menjadi item angket (*quisionery*). Adapun kisi-kisi variabel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item	Jml Item
Penerapan <i>E-Procurement</i> (X₁) Willem (2012:11)	• Efisien	• penggunaan dana • penggunaan daya • penggunaan fasilitas	1 2 3	3
	• Efektif	• sesuai dengan kebutuhan • memberikan manfaat	4 5	2
	• Kompetitif	• proses seleksi dan persaingan • memenuhi syarat/kriteria	6 7	2
	• Transparan	• informasi pengadaan barang/jasa • administrasi pengadaan • penetapan calon penyedia barang/jasa	8 9 10	3
	• Bertanggung jawab	• sasaran fisik keuangan • pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan	11 12	2
<i>Good Governance</i> (X₂) Sedarmayanti (2009:289)	• Akuntabilitas	• pembuatan keputusan dilakukan secara tertulis • pembuatan keputusan sudah memenuhi standar • kejelasan sasaran kebijakan • konsistensi target operasional	1 2 3 4	4
	• Kejelasan dan ketersediaan	• kejelasan tugas dan kewenangan • ketersediaan informasi publik • proses penganggaran secara terbuka • jaminan integritas	5 6 7 8	4
	• Partisipasi	• keterlibatan masyarakat • peran aktif masyarakat	9 10	2

Lanjutan Tabel 3.1

Kinerja Lembaga (Y) Muhaimin (2010:374)	• Konteks	• landasan religius dan hukum • kondisi geografis dan demografis • tantangan masa depan	1 2 3	3
	• Input	• visi dan misi • sumber daya	4 5	2
	• Proses	• pengambilan keputusan • pengelolaan program • evaluasi	6 7 8	3
	• Output	• prestasi kerja • kenaikan pangkat/golongan	9 10	2
	• Outcome	• jenjang karier • peluang berkembang • penghasilan	11 12 13	3

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan terdahulu, majalah-majalah, dan media lainnya.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis serta langsung terhadap obyek yang diteliti.

c. Angket

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan atau menyiapkan daftar pernyataan yang sudah disusun terlebih dahulu untuk dijawab oleh responden. Angket dalam penelitian ini bersifat tertutup, artinya responden hanya dapat menjawab pernyataan dengan memilih salah satu alternatif yang ada.

Dengan memperhatikan angket yang diajukan kepada responden, untuk variabel Penerapan *Electronic Procurement* sebanyak 12 pernyataan, variabel *Good Governance* sebanyak 10 pernyataan, dan variabel Kinerja sebanyak 13 pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut disusun sedemikian rupa secara terperinci dan lengkap yang harus dijawab responden dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan dengan ketentuan “angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun menurut model *skala likert* dan dirumuskan dengan 5 kategori”.

Pernyataan yang dikemukakan bersifat kualitatif, untuk keperluan analisis data tersebut disesuaikan dengan sifat pernyataan angket. Pernyataan yang bersifat positif diberi skor 5,4,3,2,1 dan untuk pernyataan yang bersifat negatif diberi skor 1,2,3,4,5.

Penentuan skor adalah :

a. Jawaban Sangat Setuju	(SS)	dengan skor 5
b. Jawaban Setuju	(S)	dengan skor 4
c. Jawaban Kurang Setuju	(KS)	dengan skor 3
d. Jawaban Tidak Setuju	(TS)	dengan skor 2
e. Jawaban Sangat Tidak Setuju	(STS)	dengan skor 1

D. Teknik Sampling

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2004:57) menyatakan bahwa populasi adalah : “wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah populasi sebanyak 41 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Populasi Responden

No	Bagian/Bidang	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat	11
2	Pokja	20
3	Penyedia Barang/Jasa	10
Jumlah		41

2. Sampel

Pengertian sampel menurut Irwan Soehartono (1999:58) yaitu “terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel, yaitu : sampel harus mewakili (*representatif*) dan besarnya sampel harus bisa “memadai”. Untuk memenuhi kedua syarat tersebut digunakan pendekatan statistik dalam mengambil besarnya sampel yang baik, dengan menentukan *error* atau kesalahan yang dapat ditoleransi dalam pengambilan sampel.

Adapun untuk menentukan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *total sampling*, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 orang responden.

E. Teknik Analisis Data

E.1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Suatu instrumen dari variabel penelitian sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu diuji untuk mengukur validitasnya. Uji validitas berarti prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuesioner dapat mengukur dengan cermat atau tidak. Uji validitas dipergunakan untuk mengukur kecermatan setiap nomor item angket.

Teknik pengujian validitas dengan membandingkan hasil perhitungan skor butir, dimana dikatakan valid apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dengan taraf signifikansi minimal 95%. Adapun untuk rumus r_{hitung} yang digunakan adalah:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n.\sum X^2 - (\sum X)^2\}.\{n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :
 r_{hitung} : Koefisien Korelasi
 $\sum X$: Jumlah skor butir
 $\sum Y$: Jumlah total skor butir

ΣX^2 : Jumlah kuadrat skor butir
 ΣY^2 : Jumlah kuadrat total skor butir
 ΣXY : Jumlah perkalian skor butir dengan total skor butir
 n : banyak sampel uji coba.
 (Sugiyono, 2004 : 148)

b. Uji Reliabilitas

Uji keandalan atau reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu angket, yang disusun berdasarkan indikator variabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap instrumen penelitian adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach*. *Alpha Cronbach*, dengan rumus :

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Dimana :

r_{11} : Koefisien korelasi instrumen
 k : Banyaknya butir yang valid
 $\sum \sigma_b^2$: Jumlah varian butir
 σ_t^2 : Total varian

Dimana apabila nilai *Alpha Cronbach* di atas 0,7 (*Alpha Cronbach* > 0,7) maka instrumen dinyatakan reliabel. (Sugiyono, 2004: 147).

E.2. Menentukan perhitungan statistik dasar

Pengukuran gejala pemusatan atau gejala penyebaran data yang tidak dikelompokkan (data tunggal) dari hasil penelitian, menggunakan rumus:

Rentang (R) = data terbesar – data terkecil

Rata-rata = $\frac{\sum X_1}{n}$

Simapangan baku (s) = $\sqrt{\frac{n \sum X_t^2 - (\sum X_1)^2}{n(n-1)}}$

(Riduwan, 2003: 102,157)

Pengukuran gejala pemusatan dan gejala penyebaran data hasil penelitian dalam distribusi frekuensi, menggunakan rumus :

Rata-rata ($\bar{X}_1$) = $\frac{\sum f_1 X_1}{n}$

Modus (Mo) = $b_0 + P \left(\frac{d1}{d1 + d2} \right)$

Dimana :

b_1 = Batas bawah nyata kelas modus

d_1 = Selisih frekuensi kelas modus oleh frekuensi sebelumnya

d_2 = Selisih frekuensi kelas modus oleh frekuensi kelas sesudahnya

p = panjang interval kelas

Median (Me) = $b_0 + p \left(\frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right)$

Dimana :

B_0 = batas bawah nyata kelas modus

F = Frekuensi komulatif sebelum kelas median

I = panjang kelas interval

N = Banyaknya data. (Riduwan, 2003:115-120).

E.3. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Untuk keperluan pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Analysis* dengan taraf signifikan 0,05. Apabila nilai signifikansi *Alpha Kolmogorov-Smirnov* diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinearitas juga berarti kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas. Dalam analisis regresi berganda, harus terbebas dari gejala multikolinearitas.

Ada tidaknya gejala multikolinearitas bisa dicermati dari indikasi nilai VIP (Variance Inflation Factor) < 10 . Bila nilai $VIF < 10$ berarti baik atau tidak ada gejala multikolinearitas

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berkisar 1,55 sampai 2,46.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot. Dasar analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

E.4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Dalam penelitian ini diajukan tiga hipotesis untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu:

- Hipotesis Pertama

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) terhadap Kinerja Pegawai (Y)

$H_0 : b_1 = 0$: Penerapan *E-Procurement* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

$H_1 : b_1 \neq 0$: Penerapan *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

- Hipotesis Kedua

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Good Governance* (X_2) terhadap Kinerja Pegawai (Y)

$H_0 : b_2 = 0$: *Good Governance* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

$H_1 : b_2 \neq 0$: *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

- Hipotesis Ketiga

Dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) dan *Good Governance* (X_2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai (Y)

$H_0 : b_3 = 0$: Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

$H_1 : b_3 \neq 0$: Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

Adapun uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini. Hasil uji statistik t dapat dilihat dengan kriteria jika nilai *probability* $t_{hitung} >$

t_{tabel} maka H_1 diterima, sedangkan jika nilai *probability* $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

E.5. Analisis Jalur

Berikutnya menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun analisis uji pengaruh melalui analisis jalur yang hasil perhitungannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SPSS for Windows ver. 22.00*.

a) Besarnya pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) adalah sebagai berikut :

- Pengaruh langsung sebesar :

$$r_{YX_1} \times r_{YX_1}$$

- Pengaruh tidak langsung (X_2) sebesar :

$$r_{YX_1} \times r_{X_1X_2} \times r_{YX_2}$$

- Pengaruh total sebesar :

$$\text{Pengaruh langsung} + \text{Pengaruh tidak langsung } (X_2)$$

b) Besarnya pengaruh *Good Governance* (X_2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) adalah :

- Pengaruh langsung sebesar :

$$r_{YX_2} \times r_{YX_2}$$

- Pengaruh tidak langsung (X_1) sebesar :

$$r_{YX_2} \times r_{X_2X_1} \times r_{YX_1}$$

- Pengaruh total sebesar :

$$\text{Pengaruh langsung} + \text{Pengaruh tidak langsung } (X_1)$$

c) Besarnya pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) dan *Good Governance* (X_2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai (Y) adalah :

$$\text{Pengaruh total penerapan E-procurement } (X_1) + \text{Pengaruh total Good Governance } (X_2)$$

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sejak Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 2018					
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1	Penyusunan Proposal	X					
2	Pengajuan Proposal	X					
3	Seminar Proposal		X				
4	Penelitian Laporan		X	X			
5	Penulisan Tesis				X	X	
6	Telaah Sidang						X
7	Sidang						X

Institut
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan.

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan, Kesatuan Bangsa dan Politik,

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Pelayanan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Pemerintahan Umum, Kerjasama Daerah, Hukum, Organisasi serta Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah. Asisten Pemerintahan membawahkan:

a) Bagian Tata Pemerintahan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang umum pemerintahan, bidang Pembinaan Otonomi Daerah, dan bidang Pembinaan Wilayah. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum Pemerintahan;
- 2) Subbagian Bina Otonomi Daerah;
- 3) Subbagian Bina Wilayah.

b) Bagian Hukum.

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Bagian Hukum terdiri dari:

- 1) Subbagian Perundang-undangan;
- 2) Subbagian Bantuan Hukum;
- 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

c) Bagian Kerjasama Daerah.

Kepala Bagian Kerja Sama Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan lingkup Kerja Sama Daerah. Bagian Kerjasama Daerah terdiri dari:

- 1) Subbagian Kerjasama Pemerintah;
- 2) Subbagian Kerjasama Non Pemerintah; dan
- 3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

d) Bagian Organisasi.

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian Organisasi dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Pemerintahan di bidang organisasi. Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- 2) Subbagian Tata laksana dan Pelayanan Publik; dan
- 3) Subbagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan kawasaan Permukiman, Perhubungan, Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Kesehatan dan Pemuda dan Olahraga, serta Lingkungan Hidup. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

a) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, Pendidikan dan Kesehatan. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- 1) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan;
- 2) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Subbagian Kemasyarakatan dan Keagamaan.

b) Bagian Administrasi Pembangunan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Ekonomi Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat di bidang administrasi, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Kegiatan Non Fisik. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- 1) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
- 2) Subbagian Evaluasi Pembangunan; dan
- 3) Subbagian Bina Administrasi Pembangunan.

c) Bagian Administrasi Perekonomian.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan , mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perekonomian dengan ruang lingkup pengembangan potensi dan produksi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi daerah dan pengembangan Usaha Daerah. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari:

- 1) Subbagian Ekonomi;
- 2) Subbagian Pengembangan Potensi dan Produksi; dan
- 3) Subbagian Usaha Daerah.

d) Bagian Pengadaan Barang Jasa.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan, melaksanakan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

- 1) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang Jasa;
- 2) Subbagian Data Dan Informasi Pengadaan; dan
- 3) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pendapatan, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Komunikasi, Informasi dan Statistik serta melaksanakan dan membina ketatausahaan, perlengkapan, keprotokolan, dan rumah tangga, mengelola keuangan Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah serta melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan kehumasan. Asisten Administrasi Umum membawahkan:

a) Bagian Humas dan Protokol.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

- 1) Subbagian Protokol;
- 2) Subbagian Pemberitaan; dan

3) Subbagian Dokumentasi dan Peliputan.

b) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum di bidang perlengkapan dan Rumah Tangga pimpinan dan Sekretariat Daerah. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari:

- 1) Subbagian Perlengkapan;
- 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
- 3) Subbagian Pencatatan dan Pemeliharaan.

c) Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari:

- 1) Subbagian Anggaran;
- 2) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

d) Bagian Umum.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian Umum dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum di bidang umum. Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Staf Ahli Bupati.

A.2. Deskripsi Responden Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh data primer maupun sekunder, selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan data-data yang telah terkumpul melalui alat pengumpul data. Adapun sesuai dengan jumlah responden yang telah ditetapkan sebelumnya, sebanyak 35 pernyataan angket disebarkan kepada responden dan dikembalikan secara keseluruhan.

Berikutnya setelah data angket dipilah-pilah, ternyata secara keseluruhan memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian data diolah dengan menggunakan alat bantu Program SPSS 22 for Windows.

A.3. Hasil Uji Validitas Data

Untuk uji validitas terhadap item/butir pernyataan angket dilakukan dengan menggunakan teknik *Corrected Item Total Correlation*. Untuk mengujikan bahwa korelasi tersebut signifikan atau tidak, maka hasil uji r_{hitung} dapat dibandingkan dengan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 95 %. Suatu item dikatakan valid bila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Menurut Sugiono (2007:134), jika $r_{hitung} > 0,308$, maka item instrumen dinyatakan valid. Adapun untuk perhitungan uji validitas dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 22 dengan hasil sebagai berikut :

- **Penerapan *E-Procurement* (X_1)**

Untuk hasil uji validitas terhadap variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1) diperoleh dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} yang dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan *E-Procurement* (X₁)

No	Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Ket
1	Pernyataan_1	0,461	0,308	Valid
2	Pernyataan_2	0,394	0,308	Valid
3	Pernyataan_3	0,469	0,308	Valid
4	Pernyataan_4	0,415	0,308	Valid
5	Pernyataan_5	0,464	0,308	Valid
6	Pernyataan_6	0,323	0,308	Valid
7	Pernyataan_7	0,310	0,308	Valid
8	Pernyataan_8	0,465	0,308	Valid
9	Pernyataan_9	0,397	0,308	Valid
10	Pernyataan_10	0,440	0,308	Valid
11	Pernyataan_11	0,514	0,308	Valid
12	Pernyataan_12	0,323	0,308	Valid

Sumber : olahan data SPSS 2018

Berdasarkan hasil olahan data SPSS pada tabel diatas diketahui dari 12 item pernyataan data uji coba instrumen Penerapan *E-Procurement* (X₁) semua instrumen penelitian adalah valid atau semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dari 12 item pernyataan yang ada dalam angket Penerapan *E-Procurement* (X₁) semua item pernyataan dapat dipergunakan untuk penelitian.

- **Good Governance (X₂)**

Untuk hasil uji validitas terhadap variabel *Good Governance* (X₂) diperoleh dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} yang dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Hasil Uji Validitas Variabel *Good Governance* (X₂)

No	Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Ket
1	Pernyataan_1	0,442	0,308	Valid
2	Pernyataan_2	0,513	0,308	Valid
3	Pernyataan_3	0,562	0,308	Valid
4	Pernyataan_4	0,371	0,308	Valid
5	Pernyataan_5	0,575	0,308	Valid
6	Pernyataan_6	0,380	0,308	Valid
7	Pernyataan_7	0,431	0,308	Valid
8	Pernyataan_8	0,530	0,308	Valid
9	Pernyataan_9	0,324	0,308	Valid
10	Pernyataan_10	0,368	0,308	Valid

Sumber : olahan data SPSS 2018

Berdasarkan hasil olahan data SPSS pada tabel diatas diketahui dari 10 item pernyataan data uji coba instrumen *Good Governance* (X₂) semua instrumen penelitian adalah valid atau semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dari 10 item pernyataan yang ada dalam angket *Good Governance* (X₂) semua item pernyataan dapat dipergunakan untuk penelitian.

- **Kinerja Lembaga**

Untuk hasil uji validitas terhadap variabel Kinerja Lembaga (Y) diperoleh dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} yang dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Lembaga (Y)

No	Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Ket
1	Pernyataan_1	0,458	0,308	Valid
2	Pernyataan_2	0,517	0,308	Valid
3	Pernyataan_3	0,318	0,308	Valid
4	Pernyataan_4	0,584	0,308	Valid
5	Pernyataan_5	0,733	0,308	Valid
6	Pernyataan_6	0,407	0,308	Valid
7	Pernyataan_7	0,346	0,308	Valid
8	Pernyataan_8	0,690	0,308	Valid
9	Pernyataan_9	0,605	0,308	Valid
10	Pernyataan_10	0,537	0,308	Valid
11	Pernyataan_11	0,632	0,308	Valid
12	Pernyataan_12	0,502	0,308	Valid
13	Pernyataan_13	0,549	0,308	Valid

Sumber : olahan data SPSS 2018

Berdasarkan hasil olahan data SPSS pada tabel diatas diketahui dari 13 item pernyataan data uji coba instrumen Kinerja Lembaga (Y) semua instrumen penelitian adalah valid atau semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dari 13 item pernyataan yang ada dalam angket Kinerja Lembaga (Y) semua item pernyataan dapat dipergunakan untuk penelitian.

A.4. Reliabilitas Instrumen

Dalam menentukan uji keandalan (reliabilitas) instrumen pada penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach's*. Indek reliabilitas dinyatakan dalam reliabel jika nilai *Alpha Cronbach's* yang diperoleh paling tidak sebesar 0,700.

(perhitungan lengkap nilai *Alpha Cronbach's* terdapat pada lampiran 1).

- Berdasarkan pada hasil perhitungan koefisien reliabilitas instrumen Penerapan *E-Procurement* (X_1) diperoleh nilai *Alpha Cronbach's* (α) = 0,775.
- Berdasarkan pada hasil perhitungan koefisien reliabilitas instrumen *Good Governance* (X_2) diperoleh nilai *Alpha Cronbach's* (α) = 0,782.
- Berdasarkan pada hasil perhitungan koefisien reliabilitas instrumen Kinerja Lembaga (Y) diperoleh nilai *Alpha Cronbach's* (α) = 0,846.

Dengan memperhatikan pada hasil perhitungan diatas diketahui bahwa semua instrumen dalam setiap variabel memiliki nilai *Alpha Cronbach's* (α) diatas 0,700. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen andal (reliabel) untuk digunakan dalam penelitian.

A.5. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Untuk hasil analisis deskriptif pada masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif untuk data variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1) yang didapat dari hasil

penelitian berlokasi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 49,41; Simpangan Baku (SD) sebesar 4,853; Median (Me) sebesar 50,00; Mode (Mo) sebesar 50; Nilai Minimum sebesar 42 dan Nilai Maksimum sebesar 60.

Tabel 4.4
Deskriptif Statistik Penerapan *E-Procurement*

N	Valid	41
	Missing	0
Mean		49.41
Median		50.00
Mode		50
Std. Deviation		4.853
Minimum		42
Maximum		60

Kemudian untuk gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1), dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Penerapan *E-Procurement*

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	42-44	8	19,51
2	45-47	6	14,63
3	48-50	13	31,71
4	51-53	6	14,63
5	54-56	5	12,20
6	57-59	2	4,88
7	60-62	1	2,44
JUMLAH		41	100,00

Berdasarkan tabel frekuensi di atas perolehan skor terbanyak berkisar pada kelompok skor 48-50 yaitu sebanyak 13 (31,71%), sedangkan perolehan skor terkecil berada pada kisaran 60-62 yaitu sebanyak 1 (2,44%). Untuk memperjelas distribusi data variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1) tersebut, dapat dilihat pada Grafik Histogram berikut ini :

Gambar 4.1

Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1)

b. *Good Governance* (X_2)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif untuk data variabel *Good Governance* (X_2) didapat dari hasil penelitian berlokasi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 41,24; Simpangan Baku (SD) sebesar 4,482; Median

(Me) sebesar 41,00; Mode (Mo) sebesar 40; Nilai Minimum sebesar 34 dan Nilai Maksimum sebesar 50.

Tabel 4.6
Deskriptif Statistik *Good Governance*

N	Valid	41
	Missing	0
Mean		41.24
Median		41.00
Mode		40
Std. Deviation		4.482
Minimum		34
Maximum		50

Kemudian untuk gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel *Good Governance* (X_2), dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi *Good Governance*

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	34-36	9	21,95
2	37-39	4	9,76
3	40-42	11	26,83
4	43-45	9	21,95
5	46-48	6	14,63
6	49-51	2	4,88
JUMLAH		41	100,00

Berdasarkan tabel frekuensi di atas perolehan skor terbanyak berkisar pada kelompok skor 40-42 yaitu sebanyak 11 (26,83%), sedangkan perolehan skor terkecil berada pada kisaran 49-51 yaitu sebanyak 2 (4,88%). Untuk memperjelas distribusi data

variabel *Good Governance* (X_2) tersebut, dapat dilihat pada Grafik Histogram berikut ini :

Gambar 4.2

Histogram Distribusi Frekuensi Variabel *Good Governance* (X_2)

c. Kinerja Lembaga (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif untuk data variabel Kinerja Lembaga (Y) yang didapat dari hasil penelitian berlokasi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 53,56; Simpangan Baku (SD) sebesar 5,895; Median (Me) sebesar 54,00; Mode (Mo) sebesar 48; Nilai Minimum sebesar 43 dan Nilai Maksimum sebesar 64.

Tabel 4.8
Deskriptif Statistik Kinerja Lembaga

N	Valid	41
	Missing	0
Mean		53.56
Median		54.00
Mode		48
Std. Deviation		5.895
Minimum		43
Maximum		64

Kemudian untuk gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel Kinerja Lembaga (Y), dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Kinerja Lembaga

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	43-46	6	14,63
2	47-50	9	21,95
3	51-54	6	14,63
4	55-58	10	24,39
5	59-62	8	19,51
6	63-66	2	4,88
JUMLAH		41	100,00

Berdasarkan tabel frekuensi di atas perolehan skor terbanyak berkisar pada kelompok skor 55-58 yaitu sebanyak 10 (24,39%), sedangkan perolehan skor terkecil berada pada kisaran 63-66 yaitu sebanyak 2 (4,88%). Untuk memperjelas distribusi data variabel Kinerja Lembaga (Y) tersebut, dapat dilihat pada Grafik Histogram berikut ini :

Gambar 4.3

Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Lembaga (Y)

A.6. Method of Successive Interval (MSI)

Dalam melakukan analisis regresi, data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang memiliki skala pengukuran interval. Pada data yang dikompulir sekarang, baik data dependen maupun independen memiliki skala pengukuran ordinal, untuk itu skala pengukuran likert pada data perlu ditransformasi menjadi data dengan skala interval menggunakan method of successive interval untuk digunakan sebagai analisis lanjutan. Berikut adalah hasil transformasi dari setiap variabel :

Tabel 4.10
Hasil Transformasi MSI

X1	X2	Y
31,34	19,36	24,74
22,59	22,86	23,30
34,58	25,29	23,37
23,99	17,06	21,25
19,06	14,34	17,65
20,06	15,39	20,98
19,51	16,07	22,60
29,06	25,12	38,55
35,82	21,54	34,21
28,48	21,22	23,47
34,58	29,50	33,12
19,02	17,54	18,57
25,24	27,59	31,60
40,83	32,19	37,64
32,57	28,31	36,64
25,90	21,17	26,47
28,41	21,59	35,01
29,20	22,64	30,64
18,98	17,16	21,04
21,40	17,27	23,67
28,56	26,90	36,76
21,85	21,49	35,36
28,74	27,20	34,13
38,18	30,67	42,32
31,02	27,20	36,47
28,74	28,80	29,12
36,05	25,46	38,98
28,64	23,52	35,19
22,82	21,61	25,93
29,74	22,20	26,99
38,33	33,37	38,80
23,44	15,47	23,25
26,33	25,92	29,36
22,40	17,61	25,57
28,84	23,96	35,29

Lanjutan Tabel 4.10

32,33	25,23	34,04
26,10	15,77	27,93
27,39	19,22	32,80
21,50	17,11	18,81
30,23	30,67	41,30
35,91	29,94	37,72

A.7. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam menentukan uji normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Analysis* dengan taraf signifikan 0,05 dan jumlah $n = 41$. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Uji Normalitas Variabel

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Penerapan E_Procurement	.111	41	.200*	.959	41	.144
Good Governance	.099	41	.200*	.955	41	.106
Kinerja Lembaga	.135	41	.059	.948	41	.060

- Dari hasil uji normalitas pada tabel di atas, terlihat bahwa Signifikansi Alpha Kolmogorov-Smirnov dari variabel Penerapan *E-Procurement* (X_1) sebesar 0,200. Karena Signifikansi Alpha Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 (0,200 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan

E-Procurement (X_1) berasal dari data yang berdistribusi normal.

- Dari hasil uji normalitas pada tabel di atas, terlihat bahwa Signifikansi Alpha Kolmogorov-Smirnov dari variabel *Good Governance* (X_2) sebesar 0,200. Karena Signifikansi Alpha Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* (X_2) berasal dari data yang berdistribusi normal.
- Dari hasil uji normalitas pada tabel di atas, terlihat bahwa Signifikansi Alpha Kolmogorov-Smirnov dari variabel Kinerja Lembaga (Y) sebesar 0,059. Karena Signifikansi Alpha Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 ($0,059 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Lembaga (Y) berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinearitas juga berarti kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas. Dalam analisis regresi berganda, harus terbebas dari gejala multikolinearitas.

Ada tidaknya gejala multikolinearitas bisa dicermati dari indikasi nilai VIP (Variance Inflation Factor) < 10 . Bila nilai VIF < 10 berarti baik atau tidak ada gejala multikolinearitas. Berikut ini hasil perhitungan uji multikolinearitas :

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.122	5.725		.895	.377		
Penerapan E_Procurement	.348	.180	.286	2.930	.001	.395	2.533
Good Governance	.758	.195	.576	3.889	.000	.395	2.533

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Durbin-

Watson berkisar 1,55 sampai 2,46. Adapun hasil perhitungan uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.819 ^a	.671	.653	3.471	1.852

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,852. Karena nilai Durbin-Watson berkisar antara 1,55 sampai 2,46, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot. Dasar analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut ini hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot :

Gambar 4.4 Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot pada gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Sebagaimana terlihat, titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

A.8. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Dalam penelitian ini diajukan tiga hipotesis untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu:

- Hipotesis Pertama

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) terhadap Kinerja Lembaga (Y)

$H_0 : b_1 = 0$: Penerapan *E-Procurement* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga.

$H_1 : b_1 \neq 0$: Penerapan *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

- Hipotesis Kedua

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Good Governance* (X_2) terhadap Kinerja Lembaga (Y)

$H_0 : b_2 = 0$: *Good Governance* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga.

$H_1 : b_2 \neq 0$: *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

- Hipotesis Ketiga

Dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) dan *Good Governance* (X_2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga (Y)

$H_0 : b_3 = 0$: Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga.

$H_1 : b_3 \neq 0$: Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga.

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya.

Adapun uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini. Hasil uji statistik t dapat dilihat dengan kriteria jika nilai *probability* $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima, sedangkan jika nilai *probability* $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Tabel 4.14.
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.122	5.725		.895	.377
Penerapan E_Procurement	.348	.180	.286	2.930	.001
Good Governance	.758	.195	.576	3.889	.000

Dengan melihat pada Tabel 4.14 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Adapun untuk hasil uji hipotesis sebagai berikut :

- **Pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap Kinerja Lembaga**

Untuk mengetahui keberartian atau signifikansi pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) terhadap Kinerja Lembaga (Y), nilai t_{hitung} yang diperoleh perlu terlebih dahulu dibandingkan dengan nilai T_{tabel} . Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,930. Sedangkan nilai T_{tabel} pada

tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha=5\%$) dengan *degree of freedom* (df) = 40 adalah 2,021.

Oleh karenanya, jika dibandingkan antara nilai t_{hitung} (2,930) dan nilai T_{tabel} (2,021), maka nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} . Ini berarti Hipotesis nol (H_0) yang berbunyi : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Procurement* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang “**ditolak**”; dan Hipotesis alternatif (H_1) yang berbunyi : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Procurement* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang “**diterima**”.

- **Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Lembaga**

Untuk mengetahui keberartian atau signifikansi pengaruh *Good Governance* (X_2) terhadap Kinerja Lembaga (Y), nilai t_{hitung} yang diperoleh perlu terlebih dahulu dibandingkan dengan nilai T_{tabel} . Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,889. Sedangkan nilai T_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha=5\%$) dengan *degree of freedom* (df) = 40 adalah 2,021.

Oleh karenanya, jika dibandingkan antara nilai t_{hitung} (3,889) dan nilai T_{tabel} (2,021), maka nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai T_{tabel} . Ini berarti Hipotesis nol (H_0) yang berbunyi : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan *Good Governance* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang “**ditolak**”; dan Hipotesis alternatif (H_1) yang berbunyi : Terdapat pengaruh positif dan signifikan *Good Governance* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang “**diterima**”.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan konsekuensinya H_1 diterima, demikian sebaliknya. Adapun hasil analisis data, uji signifikan simultan (uji statistik F) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	932.201	2	466.100	38.681	.000 ^a
	Residual	457.897	38	12.050		
	Total	1390.098	40			

Untuk mengetahui keberartian atau signifikansi pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) dan *Good Governance* (X_2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga (Y) dilakukan dengan uji-F. F_{hitung} yang diperoleh perlu terlebih dahulu dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 38,681. Sedangkan nilai F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha=5\%$) dengan *degree of freedom* (df) = 39 adalah 3,238.

Oleh karenanya, jika dibandingkan antara nilai F_{hitung} (38,681) dan nilai F_{tabel} (3,238), maka nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} . Ini berarti Hipotesis nol (H_0) yang berbunyi : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang “ditolak”; dan Hipotesis alternatif (H_1) yang berbunyi : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga

pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang “**diterima**”.

A.9 Analisis Jalur

Berikutnya menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun analisis uji pengaruh melalui analisis jalur yang hasil perhitungannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SPSS for Windows* ver. 22.00 dan hasilnya terlihat seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.16.
Matriks Koefisien Korelasi Variabel Penelitian

		Penerapan E_Procurement	Good Governance	Kinerja Lembaga
Penerapan E_Procurement	Pearson Correlation	1	.578**	.534**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	41	41	41
Good Governance	Pearson Correlation	.578**	1	.199**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	41	41	41
Kinerja Lembaga	Pearson Correlation	.534**	.199**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	41	41	41

Apabila dilihat dari ukuran tingkat signifikansinya, tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa korelasi signifikansi di antara keempat variabel pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, adalah signifikan. Jika selanjutnya ingin dihitung berapa besar pengaruh dari variabel

Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Lembaga baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dihitung besaran koefisien jalur seperti berikut ini:

Gambar 4.5 Nilai Koefisien Jalur Variabel Penelitian

a) Besarnya pengaruh Penerapan *E-Procurement* (X_1) terhadap Kinerja Lembaga (Y) adalah sebagai berikut :

- Pengaruh langsung sebesar :

$$r_{yx_1} \times r_{yx_1} = (0,534) \times (0,534) = 0,2851$$

- Pengaruh tidak langsung (X_2) sebesar :

$$r_{yx_1} \times r_{x_1x_2} \times r_{yx_2} = (0,534) \times (0,578) \times (0,199) = 0,061$$

- Pengaruh total sebesar $= 0,2851 + 0,061 = 0,3461$

Jadi pengaruh total dari Penerapan *E-Procurement* (X_1) terhadap Kinerja Lembaga (Y) adalah sebesar 34,61 %.

b) Besarnya pengaruh *Good Governance* (X_2) terhadap Kinerja Lembaga (Y) adalah :

- Pengaruh langsung sebesar :

$$r_{yx_2} \times r_{yx_2} = (0,199) \times (0,199) = 0,0396$$

- Pengaruh tidak langsung (X_1) sebesar :

$$r_{yx_2} \times r_{x_2x_1} \times r_{yx_1} = (0,199) \times (0,578) \times (0,534) = 0,061$$

- Pengaruh total sebesar $= 0,0396 + 0,061 = 0,1006$

Jadi pengaruh total dari *Good Governance* (X_2) terhadap Kinerja Lembaga (Y) adalah sebesar 10,06 %.

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kinerja Lembaga (Y) dipengaruhi oleh variabel penerapan *E-Procurement* (X_1) *Good Governance* (X_2) secara bersama-sama sebesar 34,61 % + 10,06 % = 44,67 %, sedangkan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti sebesar $100\% - 44,67\% = 55,33\%$.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kinerja Lembaga Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Dari hasil perhitungan pada pengolahan data penelitian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,930 sedangkan T_{tabel} dengan derajat bebas (df) 40 pada α (0,05) sebesar 2,021, dengan demikian nilai $t_{hitung} > T_{tabel}$, sehingga hipotesis yang diambil adalah H_0 : ditolak dan H_1 : diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut maka pengujian hipotesis telah terbukti : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Procurement* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Besar pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 34,61 %, yang terdiri dari pengaruh langsung sebesar 28,51 % dan pengaruh tidak langsung sebesar 6,1 %.

Menurut Willem (2012:80) *E-Procurement* adalah merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI). Adapun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip

pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab.

Menurut Sutedi (2012-254) manfaat dari pelaksanaan *E-Procurement* adalah dengan *E-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.

B.2. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Dari hasil perhitungan pada pengolahan data penelitian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,889 sedangkan T_{tabel} dengan derajat bebas (df) 40 pada α (0,05) sebesar 2,021, dengan demikian nilai $t_{hitung} > T_{tabel}$, sehingga hipotesis yang diambil adalah H_0 : ditolak dan H_1 : diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut maka pengujian hipotesis telah terbukti : Terdapat pengaruh positif dan signifikan *Good Governance* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Besar pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 10,06 %, yang terdiri dari pengaruh langsung sebesar 3,96 % dan pengaruh tidak langsung sebesar 6,1 %.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007:2).

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip- prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, kejelasan dan ketersediaan, dan partisipasi (Sedarmayanti, 2009:289).

B.3. Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Dan *Good Governance* Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja Lembaga Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Dari hasil perhitungan pada pengolahan data penelitian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 38,681 sedangkan F_{tabel} dengan derajat bebas (df) 39 pada α (0,05) sebesar 3,238, dengan demikian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga hipotesis yang diambil adalah H_0 : ditolak dan H_1 : diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut maka pengujian hipotesis telah terbukti : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Besar pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Lembaga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 44,67 %.

Kinerja Lembaga adalah penampilan hasil karya pegawai baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada pegawai yang memegang jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran pegawai di dalam organisasi. Dimensi kinerja menurut Gery Dessler (2004:57) meliputi : a. kualitas kerja (*quality of output*); b.

kuantitas kerja (*quantity of output*); c. jumlah waktu kerja (*time of work*); d. kerjasama (*corporation*); e. supervisi (*supervision*).

Keberhasilan dalam mengelola barang/jasa, maka pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang perlu memperhitungkan aspek-aspek sesuai dengan hasil penelitian, yaitu perlunya memperhatikan faktor penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance*. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengefektifkan tata kelola barang dan jasa.

Institut
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAM

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 34,61 %. Dengan kata lain, semakin baik Penerapan *E-Procurement* yang ada, maka Kinerja Pengadaan Barang/Jasa akan semakin meningkat.
2. *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 10,06 %. Dengan kata lain, semakin baik *Good Governance* yang ada, maka Kinerja Pengadaan Barang/Jasa akan semakin meningkat.

3. Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 44,67%. Dengan kata lain, semakin baik Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance*, maka Kinerja Pengadaan Barang/Jasa akan semakin meningkat.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu :

1. Untuk meningkatkan implementasi *E-Procurement* dapat diperhatikan beberapa faktor, yaitu efisien dalam penggunaan dana maupun fasilitas, efektif sesuai dengan kebutuhan, kompetitif dalam proses seleksi dan persaingan, transparan dalam penetapan calon penyedia barang/jasa, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan.
2. Adapun untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *Good Governance* yaitu akuntabilitas dalam pembuatan keputusan, adanya kejelasan tugas dan kewenangan, proses penganggaran dilaksanakan secara terbuka, adanya keterlibatan dan peran aktif dari masyarakat.

3. Sebaiknya dibuatkan peraturan daerah tentang pengadaan barang dan jasa supaya dilaksanakan secara online agar dapat diakses oleh masyarakat dan dilaksanakan secara transparan.
4. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut agar diketahui faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa selain faktor Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance*.

Institut
ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aditya, Dimas. 2014. *Pengaruh E-Procurement dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan (Survey pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kabupaten Purwakarta)*. digilib.unpas.ac.id.
- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Ar.Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.
- As'ad, Mohammad, 1995, *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Liberty.
- Badzlina Daroyani Novitaningrum, 2014, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya), Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, ISSN 2303 -341X
- Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. 2004. *The Public Administration Dictionary*, Santa Barbara, California: ABC-Clio.
- Damayanti, Deni. 2014. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Disertasi*.Yogyakarta: Alaska.
- Dessler, Gerry, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
- Djojosoekarto, Agung, dkk, 2008, *Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta.
- Ervianto, W. I. 2002. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk. 2009. *Inovasi Layanan Publik melalui E-Procurement*, diambil dari *Makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik*. Bappenas. Jakarta: LKPP.
- Handayaniingrat, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung.
- Hasibuan Malayu SP. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Irwan, Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kerlinger, F.N. & Lee.H.B. 2000. *Foundation of behavioral Research* (Edisi Terjemahan). New York: Hartcourt College Publisher.
- Koentjaraningrat. 1997. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mangkunegara, A.A.P, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2006. *Research in education: A conceptual introduction (5th ed.)*. New York: Longman.
- Muhaimin, dkk 2010. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Mulia Group.
- Mondy, Sharplin and Flipo, Edwin, 1998, *Personnel Management*, Singapore : Mc. Graw Hill Inc.
- Nawawi, Hadari,1994, *"Ilmu Administrasi"*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Pakpahan, A. 1989. *Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial Perspektif Ekonomi Institusi*. Prosiding Forum Agro Ekonomi. Bogor dalam Elizabeth, R dan Anugrah, IS. 2010. Kelembagaan Ekonomi pada Komunitas Petani Sayuran di Provinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional. PESKP. Bogor.
- Riduwan, 2003, *Dasar-Dasar Statistika*, Cetakan Ketiga, Bandung : Alfabeta.

- Saefulah, Djadja, 2005, *Filsafat Administrasi*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Saptana, dkk. 2003. *Transformasi Kelembagaan Tradisional*. PSEKP. Bogor.
- Sedarmayanti, 2007, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- _____. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P, 1974, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.
- Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Simamora, Henry, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua Yogyakarta : STIE YKPN
- Sudaryanto, dkk. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian 2005. *Laporan Akhir Pengkajian dan Pengembangan Model Operasional Percepatan Masyarakat Inovasi Teknologi Pertanian Melalui Prima Tani?*. PSEKP. Bogor.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Rineka
- Suprihanto, John, 2007, *Manajemen Personalia (Pokok-Pokok, Kasus dan Soal Jawab)*, Yogyakarta : BPFE.
- Suradisastra, dkk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2009. *Laporan Hasil Penelitian Perumusan Model Kelembagaan Petani untuk Revitalisasi Kegiatan Ekonomi Perdesaan?*. PSEKP. Bogor.
- Uphoff, N. 1992. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. Gatekeeper Series SA31. IIED, London.
- Wibowo, S. Haryan, 2007, *Pengukuran Kinerja Pegawai*, Yogyakarta : Kanisius.

Jurnal :

H. Rahadian. 2009. *Memahami Konsep Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat (Good Corporate Governance)*. Jurnal Bijak Vol.8 no.15;hal 75-90. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMl).

_____. 2010. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMl)

H. Rahadian dan Irman Gapur. 2015. *Pengaruh Sistem E-Procurement Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor*. Jurnal Ilmu Sosial dan Manajemen : STIAMl Jakarta.

Andri Veno. 2015. *The Influence of Good Corporate Governance toward Corporate Performance of Corporate Manufacture Go Public*. Jurnal Manajemen dan Bisnis : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mary Ismowati. 2016. *Kajian Urgensi Public Private Partnerships Di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah Ilmu administrasi : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMl.

_____. 2018. *Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Iklim Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat*. Jurnal Transparansi : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMl.

Lisa Oktaviani. 2017. *The Effect of E-Procurement Against the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan*. Universitas Negeri Padang.

Mahardika lintangsari, Dini Wahyu Hapsari, Eddy Budiono. 2017. *The Effect of E-Procurement Implementation, Internal Control of Preventing Fraud (Empirical Study on PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten)*. Telkom University.

Maria Rofina. 2013. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di BEI*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. STIESIA Surabaya.

Sulistiyowati. 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. STIESIA Surabaya.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama LIA HERIAWATI,,lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Mei 1979, Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Eri Azhari Kusumah dan Ibu Nining Bandiningsih (Alm)

Penulis berdomisili di Perumahan Kaduhejo Kadulisung Blok D No 21 desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandegng Provinsi Banten. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

1. SDN Nelayan I Labuan, lulus Tahun 1991
2. SMPN 1 Labuan,lulus Tahun 1994
3. SMUN 1 Labuan, lulus Tahun 1997
4. AKADEMI SEKRETARI & MANAJEMEN KENCANA Bandung, lulus tahun 2000
5. STISIP Banten Raya Pandeglang, lulus Tahun 2007

Sampai dengan Penulisan tesis ini penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana di Institut STIAMI Jakarta

A. LAMPIRAN 1 : ANGKET

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Pegawai
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Pandeglang
di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Melalui kesempatan ini kami lampirkan angket yang terdiri dari tiga bagian/variabel. Adapun angket ini kami perlukan dalam rangka untuk memperoleh data guna penyusunan Tesis.

Dengan memperhatikan tujuan dari penyebaran angket ini yaitu adalah semata-mata untuk kepentingan akademis, maka silahkan merespon setiap item pernyataan dengan leluasa dan tanpa beban, dalam arti betul-betul sesuai dengan kondisi (pendapat, perasaan, pengalaman) yang sebenarnya.

Hormat Kami

LIA HERIAWATI

Petunjuk Pengisian :

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar, dengan memberi tanda silang (X) pada angka yang anda pilih.

Keterangan :

1. Sangat Tidak Setuju. (STS)
2. Tidak Setuju. (TS)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju. (S)
5. Sangat Setuju. (SS)

A. Penerapan *Electronic Procurement* (X₁)

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Menurut anda, apakah proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan dana yang sekecil kecilnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.					
2	Menurut anda, apakah proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan daya yang sekecil kecilnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.					
3	Menurut anda, apakah proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan fasilitas yang sekecil kecilnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.					
4	Menurut anda, apakah proses pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.					
5	Menurut anda, apakah proses pengadaan barang/jasa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.					
6	Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara.					
7	Proses pengadaan barang/jasa sudah memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.					
8	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat terbuka.					
9	Administrasi pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel.					
10	Penetapan calon penyedia barang/jasa dilakukan secara terbuka dan transparan.					
11	Bertanggung jawab dalam mencapai sasaran fisik keuangan.					
12	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan.					

B. Good Governance (X₂)

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Menurut pendapat anda, apakah pembuatan keputusan dilakukan secara tertulis dan terbuka.					
2	Menurut pendapat anda, apakah pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.					
3	Menurut pendapat anda, apakah terdapat kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sesuai dengan visi dan misi organisasi.					
4	Pegawai memiliki konsistensi dari target operasional yang telah ditetapkan dalam mencapai target.					
5	Menurut pendapat anda, apakah terdapat kejelasan tugas dan wewenang.					
6	Menurut pendapat anda, apakah terdapat ketersediaan informasi publik.					
7	Menurut pendapat anda, apakah proses penganggaran dilakukan secara terbuka.					
8	Menurut pendapat anda, apakah terdapat jaminan integritas dari kantor.					
9	Menurut pendapat anda, apakah terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.					
10	Masyarakat turut berperan aktif dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintahan.					

C. Kinerja Lembaga (Y)

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Pegawai mengetahui adanya landasan religius dan hukum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.					
2	Pegawai mengetahui kondisi geografis dan demografis pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.					
3	Pegawai bekerja lebih maksimal dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan.					
4	Pegawai mengetahui adanya visi dan misi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.					
5	Sumber daya yang ada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sudah mencukupi.					
6	Pimpinan dalam proses pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.					
7	Proses pengelolaan program dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana program.					
8	Pegawai dapat mengevaluasi diri terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.					
9	Pegawai dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memperoleh prestasi kerja yang lebih baik.					
10	Kenaikan pangkat/golongan diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk naik pangkat.					
11	Pegawai mempunyai jenjang karier yang baik dalam rangka meningkatkan pangkat/golongan.					
12	Pegawai mempunyai peluang berkembang untuk meningkatkan kinerja lembaga.					
13	Penghasilan yang diperoleh pegawai sudah memadai dalam mencukupi kebutuhan hidup.					

NO	Angket X ₁												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	4	3	3	5	3	5	4	5	3	3	3	5	46
33	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
34	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
35	4	4	4	5	5	3	5	3	5	4	5	3	50
36	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	53
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
38	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	49
39	4	3	4	3	3	5	3	4	3	4	3	5	44
40	4	5	4	5	3	5	3	5	3	4	5	5	51
41	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	56
Jml	164	171	166	163	173	171	175	167	166	166	173	171	2026
Mean	3.93	4.12	4.02	3.98	4.24	4.21	4.33	4.17	4.17	4.19	4.38	4.36	49.41

2. GOOD GOVERNANCE (X₂)

NO	Angket X ₂										Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	4	5	4	3	5	4	3	3	4	38
2	3	5	4	5	4	3	4	3	5	5	41
3	5	5	4	5	3	3	5	4	5	4	43
4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	36
5	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	34
6	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	35
7	3	5	3	4	3	3	4	4	3	3	35
8	5	5	5	4	3	4	4	3	5	5	43
9	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	40
10	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	40
11	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	47
12	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	37
13	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	45
14	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
15	5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	46
16	5	4	3	3	4	4	3	4	5	5	40
17	4	4	3	4	4	3	4	5	4	5	40
18	4	4	5	4	5	5	4	4	3	3	41
19	3	3	3	4	3	3	4	3	5	5	36
20	4	4	3	4	3	3	4	3	3	5	36
21	5	5	5	3	5	5	3	5	4	5	45
22	4	3	5	4	5	3	4	3	4	5	40
23	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	45
24	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
25	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	45
26	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	46
27	3	5	3	5	5	3	5	5	4	5	43
28	5	5	5	3	5	3	3	5	3	5	42
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	40
30	4	3	4	5	3	4	5	4	3	5	40
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	5	3	3	3	3	3	3	3	5	4	35
33	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	44
34	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	37

NO	Angket X ₂										Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	3	3	5	4	5	5	4	5	3	5	42
36	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	43
37	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	35
38	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38
39	5	3	3	4	3	3	4	3	5	3	36
40	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
41	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	47
Jml	169	172	170	166	169	162	164	170	167	182	1691
Mean	4.05	4.14	4.12	4.05	4.14	4.00	4.07	4.24	4.19	4.57	41.24

NO	Angket Y													Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	50
35	5	5	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	4	58
36	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	57
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
38	3	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	56
39	3	3	5	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	44
40	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	63
41	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	60
Jml	161	179	168	169	174	166	170	173	172	161	172	164	167	2196
Mean	3.86	4.31	4.07	4.12	4.26	4.10	4.21	4.31	4.31	4.07	4.36	4.19	4.29	53.56

C. LAMPIRAN 3 : HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1. PENERAPAN E-PROCUREMENT (X₁)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan_1	45.41	19.449	.461	.754
Pernyataan_2	45.24	20.539	.394	.761
Pernyataan_3	45.37	20.088	.469	.754
Pernyataan_4	45.44	20.152	.415	.759
Pernyataan_5	45.20	20.011	.464	.754
Pernyataan_6	45.24	20.689	.323	.769
Pernyataan_7	45.15	20.628	.310	.771
Pernyataan_8	45.34	19.680	.465	.753
Pernyataan_9	45.37	20.038	.397	.761
Pernyataan_10	45.37	20.438	.440	.757
Pernyataan_11	45.20	19.911	.514	.749
Pernyataan_12	45.24	20.689	.323	.769

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	12

2. GOOD GOVERNANCE (X₂)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan_1	37.12	16.660	.442	.764
Pernyataan_2	37.05	16.248	.513	.755
Pernyataan_3	37.10	15.740	.562	.748
Pernyataan_4	37.20	17.561	.371	.772
Pernyataan_5	37.12	15.560	.575	.746
Pernyataan_6	37.29	17.062	.380	.772
Pernyataan_7	37.24	17.239	.431	.766
Pernyataan_8	37.10	16.090	.530	.753
Pernyataan_9	37.17	17.095	.324	.781
Pernyataan_10	36.80	17.411	.368	.773

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.782	10

3. KINERJA LEMBAGA (Y)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan_1	49.63	29.788	.458	.839
Pernyataan_2	49.20	30.061	.517	.834
Pernyataan_3	49.46	31.355	.318	.848
Pernyataan_4	49.44	29.452	.584	.830
Pernyataan_5	49.32	27.922	.733	.819
Pernyataan_6	49.51	31.056	.407	.841
Pernyataan_7	49.41	33.699	.346	.865
Pernyataan_8	49.34	28.580	.690	.822
Pernyataan_9	49.37	29.538	.605	.829
Pernyataan_10	49.63	29.538	.537	.833
Pernyataan_11	49.37	29.088	.632	.827
Pernyataan_12	49.56	29.902	.502	.835
Pernyataan_13	49.49	29.906	.549	.832

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.846	13

D. LAMPIRAN 4 : HASIL OLAHAN DESKRIPTIF

1. PENERAPAN E-PROCUREMENT (X₁)

Statistics

Penerapan E-Procurement

N	Valid	41
	Missing	0
Mean		49.41
Median		50.00
Mode		50
Std. Deviation		4.853
Minimum		42
Maximum		60

Penerapan E-Procurement

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	42	4	9.8	9.8	9.8
	43	1	2.4	2.4	12.2
	44	3	7.3	7.3	19.5
	45	3	7.3	7.3	26.8
	46	2	4.9	4.9	31.7
	47	1	2.4	2.4	34.1
	48	3	7.3	7.3	41.5
	49	1	2.4	2.4	43.9
	50	9	22.0	22.0	65.9
	51	2	4.9	4.9	70.7
	52	2	4.9	4.9	75.6
	53	2	4.9	4.9	80.5
	55	2	4.9	4.9	85.4
	56	3	7.3	7.3	92.7
	58	2	4.9	4.9	97.6
	60	1	2.4	2.4	100.0
Total		41	100.0	100.0	

Berikut ini perhitungan distribusi frekuensi dengan menggunakan Rumus Sturges :

Nilai min = 42

Nilai max = 60

Rentang (max – min) = 18

Banyaknya responden (n) = 41

Banyaknya Kelas interval = $1 + 3,3 \log 41 = 6,32 \rightarrow 6$ atau 7

Panjang Kelas interval (p) = $18/7 = 2,57 \rightarrow 3$ atau 4

Maka distribusi frekuensi adalah sebagai berikut :

Perhitungan Distribusi Frekuensi Penerapan E-Procurement (X_1)

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	42-44	8	19,51
2	45-47	6	14,63
3	48-50	13	31,71
4	51-53	6	14,63
5	54-56	5	12,20
6	57-59	2	4,88
7	60-62	1	2,44
JUMLAH		41	100,00

Adapun untuk grafik histogram distribusi frekuensi sebagai berikut :

2. GOOD GOVERNANCE (X₂)

Statistics

Good Governance

N	Valid	41
	Missing	0
Mean		41.24
Median		41.00
Mode		40
Std. Deviation		4.482
Minimum		34
Maximum		50

Good Governance

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 34	1	2.4	2.4	2.4
35	4	9.8	9.8	12.2
36	4	9.8	9.8	22.0
37	2	4.9	4.9	26.8
38	2	4.9	4.9	31.7
40	7	17.1	17.1	48.8
41	2	4.9	4.9	53.7
42	2	4.9	4.9	58.5
43	4	9.8	9.8	68.3
44	1	2.4	2.4	70.7
45	4	9.8	9.8	80.5
46	2	4.9	4.9	85.4
47	2	4.9	4.9	90.2
48	2	4.9	4.9	95.1
49	1	2.4	2.4	97.6
50	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Berikut ini perhitungan distribusi frekuensi dengan menggunakan Rumus Sturges :

Nilai min = 34

Nilai max = 50

Rentang (max – min) = 16

Banyaknya responden (n) = 41

Banyaknya Kelas interval = $1 + 3,3 \log 41 = 6,32 \rightarrow 6$ atau 7

Panjang Kelas interval (p) = $16/6 = 2,67 \rightarrow 3$ atau 4

Perhitungan Distribusi Frekuensi Good Governance (X_2)

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	34-36	9	21,95
2	37-39	4	9,76
3	40-42	11	26,83
4	43-45	9	21,95
5	46-48	6	14,63
6	49-51	2	4,88
JUMLAH		41	100,00

Adapun untuk grafik histogram distribusi frekuensi sebagai berikut :

3. KINERJA LEMBAGA (Y)

Statistics

Kinerja Lembaga

N	Valid	41
	Missing	0
Mean		53.56
Median		54.00
Mode		48
Std. Deviation		5.895
Minimum		43
Maximum		64

Kinerja Lembaga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 43	1	2.4	2.4	2.4
44	2	4.9	4.9	7.3
46	3	7.3	7.3	14.6
47	1	2.4	2.4	17.1
48	5	12.2	12.2	29.3
49	1	2.4	2.4	31.7
50	2	4.9	4.9	36.6
51	2	4.9	4.9	41.5
52	1	2.4	2.4	43.9
53	2	4.9	4.9	48.8
54	1	2.4	2.4	51.2
55	1	2.4	2.4	53.7
56	2	4.9	4.9	58.5
57	3	7.3	7.3	65.9
58	4	9.8	9.8	75.6
59	3	7.3	7.3	82.9
60	2	4.9	4.9	87.8
61	3	7.3	7.3	95.1
63	1	2.4	2.4	97.6
64	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Perhitungan distribusi frekuensi dengan menggunakan Rumus Sturges :

Nilai min = 43

Nilai max = 64

Rentang (max – min) = 21

Banyaknya responden (n) = 41

Banyaknya Kelas interval = $1 + 3,3 \log 41 = 6,32 \rightarrow 6$ atau 7

Panjang Kelas interval (p) = $21/6 = 3,5 \rightarrow 3$ atau 4

Perhitungan Distribusi Frekuensi Kinerja Lembaga (Y)

No	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1	43-46	6	14,63
2	47-50	9	21,95
3	51-54	6	14,63
4	55-58	10	24,39
5	59-62	8	19,51
6	63-66	2	4,88
JUMLAH		41	100,00

Adapun untuk grafik histogram distribusi frekuensi sebagai berikut :

E. LAMPIRAN 5 : HASIL MSI DATA

X1	X2	Y
31,34	19,36	24,74
22,59	22,86	23,30
34,58	25,29	23,37
23,99	17,06	21,25
19,06	14,34	17,65
20,06	15,39	20,98
19,51	16,07	22,60
29,06	25,12	38,55
35,82	21,54	34,21
28,48	21,22	23,47
34,58	29,50	33,12
19,02	17,54	18,57
25,24	27,59	31,60
40,83	32,19	37,64
32,57	28,31	36,64
25,90	21,17	26,47
28,41	21,59	35,01
29,20	22,64	30,64
18,98	17,16	21,04
21,40	17,27	23,67
28,56	26,90	36,76
21,85	21,49	35,36
28,74	27,20	34,13
38,18	30,67	42,32
31,02	27,20	36,47
28,74	28,80	29,12
36,05	25,46	38,98
28,64	23,52	35,19
22,82	21,61	25,93
29,74	22,20	26,99
38,33	33,37	38,80
23,44	15,47	23,25
26,33	25,92	29,36
22,40	17,61	25,57
28,84	23,96	35,29

X1	X2	Y
32,33	25,23	34,04
26,10	15,77	27,93
27,39	19,22	32,80
21,50	17,11	18,81
30,23	30,67	41,30
35,91	29,94	37,72

F. LAMPIRAN 6 : HASIL OLAHAN UJI PERSYARATAN

1. Uji Normalitas Data

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Penerapan E_Procurement	.111	41	.200*	.959	41	.144
Good Governance	.099	41	.200*	.955	41	.106
Kinerja Lembaga	.135	41	.059	.948	41	.060

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas Data

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.122	5.725		.895	.377		
Penerapan E_Procurement	.348	.180	.286	2.930	.001	.395	2.533
Good Governance	.758	.195	.576	3.889	.000	.395	2.533

a. Dependent Variable: Kinerja Lembaga

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.819 ^a	.671	.653	3.471	1.852

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Penerapan E_Procurement

b. Dependent Variable: Kinerja Lembaga

4. Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

G. LAMPIRAN 7 : HASIL UJI F dan KORELASI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	932.201	2	466.100	38.681	.000 ^a
	Residual	457.897	38	12.050		
	Total	1390.098	40			

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Penerapan E_Procurement

b. Dependent Variable: Kinerja Lembaga

Correlations

		Penerapan E_Procurement	Good Governance	Kinerja Lembaga
Penerapan E_Procurement	Pearson Correlation	1	.578**	.534**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	41	41	41
Good Governance	Pearson Correlation	.578**	1	.199**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	41	41	41
Kinerja Lembaga	Pearson Correlation	.534**	.199**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	41	41	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

H. LAMPIRAN HASIL TRANSLATE ABSTRACT

<p style="margin: 0;">ABSTRACT</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">The Influence of E-Procurement and Good Governance Implementation toward The Performance of Goods/Services Procurement in Division of Goods and Services Procurement of Regional Secretary in Pandeglang Regency</p> <p style="margin: 0;">Lia Heriawati</p> <p style="margin: 20px 0 0 0;">This research aims to know and understand about how big the influence of E-Procurement's Implementation is toward Performance of Goods/ Services Procurement, and to know and understand how big the influence of Good Governance's implementation toward The Performance of Procurement of Goods/Services, and to know and understand about how big the influence of E-Procurement and Good Governance's Implementation collectively toward The Performance of Procurement of Goods/Services.</p> <p style="margin: 20px 0 0 0;">Method that is used in this research is qualitative method of regression analysis to see how big the influence of independent variable and dependent variable are. Population of this research is all of employees in Division of Procurement of Goods and Services of Regional Secretary in Pandeglang Regency in total of 41 people. The Determination of sample is using a total sampling technique, therefore the amount of sample that is used in total of 41 responder. Each responder is given about 35 statements with using Likert scale. Data analysis is using qualitative analysis with linear regression test and double, test t, test F, correlation test and determination.</p> <p style="margin: 20px 0 0 0;">Based on the result from data management shows that The Implementation of E-Procurement has a positive impact and significant toward The Performance of Procurement of</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">TRANSLATION</div>
---	--

Goods/Services in total of 34,61% .. Thereafter Good Governance has a positive impact and significant toward The Performance of Procurement of Goods and Services in total of 10,06 %.

Whereas The Implementation of E-Procurement and Good Governance are having a positive impact and significant collectively toward The Performance of Procurement of Goods/Services in total of 44,67%. This matter shows that the better of E-Procurement's implementation is and Good Governance, thereafter the more Performance of procurement Goods/Services increases.

Key words : Implementation of E-Procurement, good Services, and Performance of Procurement Goods/ Services.

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bhayangkara No. 05 Pandeglang Kode Pos 42213
Telpn (0253) 201403 Pesawat 10-32, Faks : (0253) 203800
www.setda.pandeglang.go.id, email : setda@pandeglangkab.go.id

Pandeglang, 10 Mei 2018

Nomor : 005/ 278 - Um/2018
Lamp : -
Perihal : Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada
Yth. Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa SETDA Kabupaten
Pandeglang
di-

PANDEGLANG

Menindaklanjuti surat dari STIAMI Nomor :060/PRO/MIA/Inst-STIAMI /SP/IP/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Penelitian dan Pengambilan data di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pandeglang, untuk itu dimohon untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan/ data dalam penelitian oleh mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Lia Heriawati
NPM : bc 41621043
Judul : Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
Waktu : dari Bulan Mei s/d Bulan Oktober 2018

Demikian surat pengantar ini dibuat atas kerjasamanya kami bsampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

H. PERY HASANUDIN, SH, MH

Pemula Utama Madya, IV/d
NIP. 19610828 198703 1 007

BERITA ACARA UJIAN THESIS
No.301/D/Inst-STIAM I/UT/XX/2018

Pada hari ini 20 Oktober 2018 bertempat di Ruang Sidang Kampus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I, Jl.Letjend. Suprpto No. 504A Cempaka Putih Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Ujian Thesis.

N a m a : Lia Herlawati

N P M : BC416212043

Konsentrasi : Administrasi Publik

Judul : Pengaruh Penerapan Elektronik Procurement dan Good Governance terhadap kinerja Pengadaan barang /jasa pada bagian Pengadaan Barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Keputusan : /Lulus dengan Perbaikan/

Nilai : 81 (A)

Jakarta, 20 Oktober 2018

Jabatan	Nama
Ketua Sidang	Dr. Barnbang Irawan, M.Si, M.M
Penguji Ahli	Prof. Dr. A. Ramadhan Siregar, MS
Pembimbing	Dr. Mary Ismowati, M.Si

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dr. Taufan Maulamin, SE, Akt, M.M
Direktur Program

FORMULIR	Dokumen FR-PRO-02A-31	Halaman 1/1
	Koreksi Tesis	Tanggal: 31 Maret 2015	Revisi 0

FORM KOREKSI TESIS

Nama : Lia Heriawati

N P M : BC416212043

Konsentrasi : Administrasi Publik

Judul : Pengaruh Penerapan Elektronik Procurement dan Good Governance terhadap kinerja Pengadaan barang /jasa pada bagian Pengadaan Barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

NO	Bab	Hal	Uraian
1			Abstrak parbaiki
2			Tokoh → Pengadaan barang/jasa
3			
4			
5			Saran → parbaiki.

Jakarta, 20 Oktober 2018

Prof. Dr. A. Ramadhan Siregar, MS
 Penguji Ahli

FORMULIR	Dokumen FR-PRO-02A-31	Halaman 1/1
	Koreksi Tesis	Tanggal: 31 Maret 2015	Revisi 0

FORM KOREKSI TESIS

Nama : Lia Heriawati

N P M : BC416212043

Konsentrasi : Administrasi Publik

Judul : Pengaruh Penerapan Elektronik Procurement dan Good Governance terhadap kinerja Pengadaan barang /jasa pada bagian Pengadaan Barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

NO	Bab	Hal	Uraian
1	1	latir beladag	- Fenomena masalahnya keliru jelas terkait dengan pengadaan barang & jasa
2	2	kain pretrak	- Konsep kumpi & charuaya kumpi pageni / kumpi lembaga → Ponek jelas (dibuatnya yang akan menyatukan kumpi pageni).
3			
4			
5			

Jakarta, 20 Oktober 2018

Dr. Bambang Irawan, M.Si, M.M
Ketua Penguji

FORMULIR	Dokumen FR-PRO-02A-31	Halaman 1/1
	Koreksi Tesis	Tanggal: 31 Maret 2015	Revisi 0

FORM KOREKSI TESIS

N a m a : Lia Heriawati

N P M : BC416212043

Konsentrasi : Administrasi Publik

Judul : Pengaruh Penerapan Elektronik Procurement dan Good Governance terhadap kinerja Pengadaan barang /jasa pada bagian Pengadaan Barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

NO	Bab	Hal	Uraian
1			
2			
3			
4			
5			

Jakarta, 20 Oktober 2018

Dr. Mary Ismowati, M.Si
Pembimbing